



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202146288, 13 September 2021

## Pencipta

Nama : **Muzdalifah**  
Alamat : Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek Meranti XI No.12 RT.035 Kota Banjarmasin, Banjarmasin, KALIMANTAN SELATAN, 70125  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muzdalifah**  
Alamat : Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek Meranti XI No.12 RT.035 Kota Banjarmasin, Banjarmasin, KALIMANTAN SELATAN, 70125  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Disertasi)**  
Judul Ciptaan : **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Agustus 2019, di Surabaya  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000275117

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**RINGKASAN**

**PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL,  
INVESTASI SWASTA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
TENAGA KERJA TERSERAP TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**UJIAN TAHAP II (TERBUKA)**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor



Oleh :  
Muzdalifah  
041317037304

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim,

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkah, karunia dan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan Disertasi ini, Allah Ar Rasyiid (Maha Pandai) yang telah memudahkan jalan bagi akal fikir dan kalbu untuk menuangkan segenap daya dan kemampuan hamba yang jauh dari kesempurnaan untuk menuangkan sedikit ilmu dalam Disertasi ini.

Disertasi dengan judul "*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan*" telah saya selesaikan. Disertasi ini mencoba menganalisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap untuk kemudian di analisis pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan juga Investasi agar memberikan manfaat yang besar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, yang pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Djoko Mursinto, SE, M.Si selaku promotor yang telah dengan tulus dan ikhlas serta penuh perhatian, kesabaran serta kearifan dalam membimbing, memotivasi serta mengarahkan hingga disertasi ini bisa selesai.

Terimakasih yang terhingga kepada Dr. Rudi Purwono, SE, M.SE yang menjadi Ko-Promotor yang dengan penuh kesabaran dan perhatian serta memberikan waktu luang disela kesibukan selaku Wadep 1 untuk berdiskusi, memberikan ide-ide yang sangat berharga dan bimbingan sehingga disertasi ini bisa selesai.

Kepada Prof. Dr. Dian Agustia, SE, M.Si, CMA.,CA.,Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Dyah Wulansari, Dra.Ec.Dev., Ph.D selaku KPS dan Dr. Unggul Hariqbal di selaku mantan KPS program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada semua mahasiswa untuk secepatnya menyelesaikan studi.

Kepada tim penguji Proposal, Kelayakan hingga ujian tahap I (tertutup) : Prof. Dr. Djoko Mursinto, SE, M.Si, Dr. Rudi Purwono, SE, M.SE, Dyah Wulansari, Dra.Ec.Dev., Ph.D, Dr. Ignatia Martha, SE, ME, Dr. Nurul Istifadah, SE, M.Si, Dr. Lilik Sugiharti, SE, M.Si, dan Drs.Ec. Tri Haryanto, MP, Ph.D yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti untuk penyempurnaan disertasi ini.

Kepada seluruh dosen pengajar pada program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas

tambahan ilmu yang sangat bermanfaat dalam memperluas cara pandang dan berfikir serta tenaga kependidikan yang telah memberikan pelayanan yang optimal selama menempuh pendidikan disini.

Kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Dr. H. Sutarto Hadi, Ph.D dan Dr. H. M. Riza Firdaus selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Dr. Zakhyadi Ariffin, Drs, M.Si, selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan tugas belajar pada program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, serta seluruh unsur Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan dukungan secara moral maupun materil hingga studi ini bisa selesai.

Kepada rekan seperjuangan di S3 Ilmu Ekonomi Angkatan 2013 (Pak Rusmin, Bu Yunita, Pak Hadi, dan Pak Arief) yang senantiasa saling memotivasi dan menguatkan selama menjalani masa studi hingga selesai. Semoga persahabatan tetap kukuh walau sudah selesai masa perjuangan bersama, tetap akan terkenang dan suatu saat jadi cerita indah buat perjuangan anak cucu dimasa depan.

Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendoakan, menyemangati serta menjadi teman diskusi, saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang diperoleh ini akan bermanfaat bagi pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dimasa mendatang.

Dengan segenap doa dan perasaan haru yang teramat dalam saya sampaikan terimakasih yang sangat besar kepada kedua orang tua saya (alm) yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih serta telah membekali saya dengan nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna bagi saya, dan kepada kedua mertua saya (Alm) yang senantiasa memberikan do'a restu dan motivasi. Kepada Saudara Kandung Saya, dan keluarga besar saya atas semua doa dan dukungan yang luar biasa hingga disertasi ini bisa selesai.

*Last but not least*, kepada suami tercinta Muhammad Fauzan Noor terimakasih atas kepercayaan dan dukungan serta kesabaran yang luar biasa selama menempuh studi, kepada kedua anak mamah (Abang Naufal dan Adek Decka) yang sudah banyak mengorbankan perasaan dan waktu kebersamaan yang banyak ditinggalkan Mamah, terimakasih untuk semua doa dan harapan yang kalian panjatkan kepada Allah agar studi mamah dimudahkan dan cepat selesai, semoga kalian punya kesempatan yang sama seperti mamah untuk bisa merasakan pendidikan tinggi hingga di luar negeri nantinya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya studi ini saya mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas amal baik serta melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Saya menyadari bahwa disertasi ini tidak luput dari kekurangan, dan semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya.

Surabaya, Juni 2019

## ABSTRACT

Muzdalifah, Postgraduate Program, Faculty of Economics and Business Airlangga University, Surabaya in 2018, **The Influence of Degrees of Fiscal Decentralization, Private Investment, Economic Growth and Labor Absorbed Public Welfare regencies/municipalities in the province of South Kalimantan**, Promotor: Djoko Mursinto, Co-Promotor: Rudi Purwono.

This study has three objectives. Firstly, examine and analyze the influence of over all or partial Degree of Fiscal Decentralization and Private Investment on Economic Growth regencies/municipalities in South Kalimantan province. Secondly, examine and analyze the influence of over all or partial Degree of Fiscal Decentralization and Private Investment on Employment Absorbed regencies/municipalities in South Kalimantan province. Thirdly, examine and analyze the influence over all or partial Economic Growth and Employment Absorbed on Public Welfare regencies/municipalities in South Kalimantan province.

This study uses panel data covering 13 districts / cities in South Kalimantan and the observation period 2005 - 2016. Data analysis techniques using the TSLS Simultaneous equation model (Two Stage Least Square)

The results of the study show that economic growth and labor absorbed over all have affect the community welfare and partial economic growth will reduce the community welfare of districts / cities in South Kalimantan Province, the degree of fiscal decentralization and private investment over all have influence economic growth and the degree of fiscal decentralization will partially reduce the economic growth of districts/cities in South Kalimantan Province, the degree of fiscal decentralization and private investment over all have influence the number of labor absorbed and partially the degree of fiscal decentralization will increase the number of labor absorbed by districts/cities in the province South Kalimantan.

Keyword : The degree of Fiscal Decentralization, Private Investment, Economic Growth, Labor Absorbed, Public Welfare, South Kalimantan

## ABSTRAK

Muzdalifah, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya 2018, Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Promotor: Djoko Mursinto, Ko-Promotor: Rudi Purwono.

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, menguji dan menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, menguji dan menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta terhadap Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan data panel yang meliputi 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan periode pengamatan 2005 – 2016. Teknik analisis data menggunakan model persamaan Simultan TSLS (*Two Stage Least Square*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara partial akan menurunkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal secara partial akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja terserap dan secara partial derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan jumlah tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Terserap, Kesejahteraan Masyarakat dan Kalimantan Selatan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRACT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	9
1.1. Latar Belakang .....	9
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.4. Manfaat Penelitian .....	17
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	18
2.1. Studi Teoritis dan Empiris .....	18
2.1.1. Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi .....	18
2.1.2. Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terserap .....	20
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Terserap dan Kesejahteraan Masyarakat .....	21
2.2. Posisi Penelitian ini terhadap Penelitian-penelitian Terdahulu .....	28
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN .....	29
3.1. Kerangka Konseptual .....	29
3.2. Hipotesis Penelitian .....	32
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	33
4.1. Pendekatan Penelitian .....	33
4.2. Spesifikasi model .....	33
4.3. Definisi Operasional .....	34
4.4. Data dan pengukuran .....	36
4.4.1. Jenis dan Sumber Data .....	36
4.4.2. Obyek penelitian .....	37
4.5. Tahapan estimasi model .....	37
4.6. Prosedur ekonometrik .....	39

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
5.1. Deskripsi Variabel Penelitian .....	41
5.1.1. Kesejahteraan Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia) .....	41
5.1.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	42
5.1.3. Tenaga Kerja Terserap .....	44
5.1.4. Derajat Desentralisasi Fiskal .....	45
5.1.5. Investasi Swasta.....	46
5.2. Analisis Persamaan Simultan TSLS ( <i>Two Stage Least Square</i> ).....	47
5.2.1. Hasil Regresi Tahap Pertama .....	47
5.2.2. Hasil Regresi Tahap Kedua .....	55
5.3. Kontribusi Hasil Penelitian.....	60
5.3.1. Temuan Teoritis.....	60
5.3.2. Temuan Empiris .....	61
5.4. Implikasi Hasil Penelitian bagi Kebijakan Daerah.....	63
5.5. Keterbatasan .....	63
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....	65
6.1. Kesimpulan.....	65
6.2. Saran .....	65
Daftar Pustaka .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Identifikasi Persamaan Simultan.....	38
Tabel 5.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2016 .....	41
Tabel 5.2	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2005-2016 (%).....	42
Tabel 5.3	Jumlah Tenaga Kerja Terserap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2016 .....	44
Tabel 5.4	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2016 (%).....	46
Tabel 5.5	Realisasi Investasi Swasta.....	46
Tabel 5.6	Hasil Estimasi Variabel DDF dan PI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Metode PLS,FEM dan REM .....	47
Tabel 5.7	Hasil Uji Chow dan Hausman.....	48
Tabel 5.8	Hasil Estimasi Variabel DDF dan PI terhadap Tenaga Kerja Terserap Metode PLS, FEM, REM .....	52
Tabel 5.9	Hasil Uji Chow dan Hausman.....	53
Tabel 5.10	Hasil Estimasi Variabel GRO dan TKT terhadap Kesejahteraan Masyarakat Metode PLS, FEM, REM.....	55
Tabel 5.11	Hasil Uji Chow dan Hausman.....	56
Tabel 5.12	Kesimpulan Hasil Analisis Kuadran .....	59

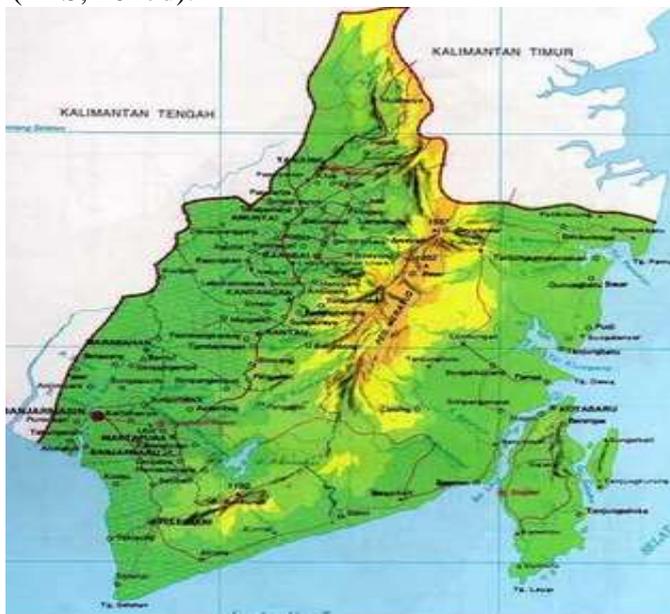
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.....	9
Gambar 1.2.	Rata-rata IPM dan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	10
Gambar 1.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (%) ..	11
Gambar 1.4	Jumlah Tenaga Kerja Terserap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.....	12
Gambar 1.5	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan .....	13
Gambar 1.6	Realisasi Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.....	13
Gambar 3.1	Bagan Kerangka Konseptual .....	31
Gambar 5.1	Distribusi PDRB (%) menurut sektor tahun 2017.....	43
Gambar 5.2	Proporsi Penduduk bekerja berdasarkan sektor di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan tahun 2018 .....	45
Gambar 5.3	Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2016 .....	50
Gambar 5.4	Pemetaan Investasi Swasta dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2005-2016 .....	54
Gambar 5.5	Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2005-2016 .....	58
Gambar 5.6	Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Tenaga Kerja Terserap dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2005-2016.....	58

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan, Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 Km<sup>2</sup> atau 6,98 % dari luas Pulau Kalimantan dan 1,9 % dari luas wilayah Indonesia. Kalimantan Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +17 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan, serta 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Selatan, adalah berupa daratan seluas 37.530,52 Km<sup>2</sup> (BPS, 2017d).



Sumber : BPS (2017d)

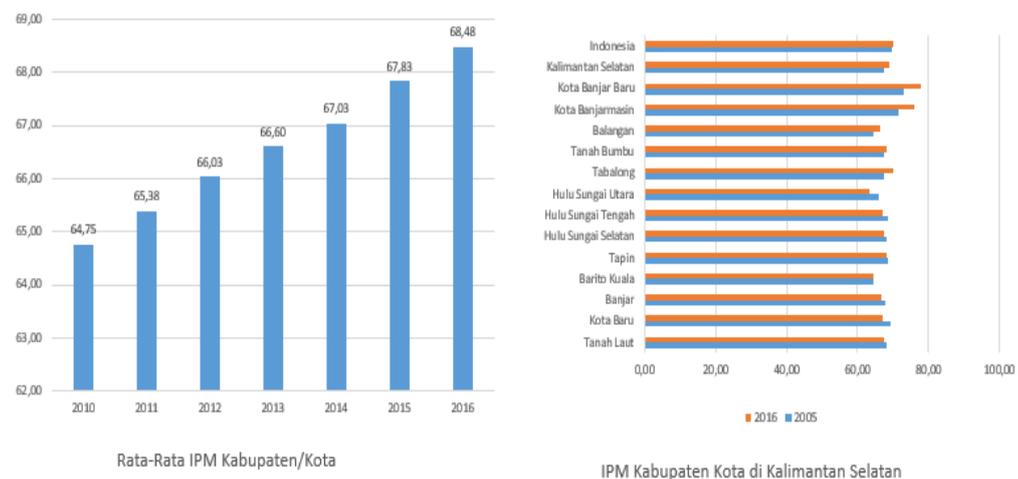
Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Penggunaan lahan di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (36,24%) terbesar di Kabupaten Kotabaru 391.164,73 Km<sup>2</sup>, Padang semak-semak, alang-alang, rumput (9,31%) terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Utara 32.594,98 Km<sup>2</sup>, lahan perkebunan (16,96%) terbesar di Kabupaten Kotabaru 224.949,65 Km<sup>2</sup>, lahan persawahan (10,66%) terbesar di Kabupaten Barito Kuala 112,747,68 Km<sup>2</sup>, Pertambangan (1,38%) terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu 17.064, 45 Km<sup>2</sup> dan untuk Pemukiman (2,39%) terbesar di Kota Banjarmasin (BPS, 2017d).

Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 11 kabupaten dan 2 kota, dari 11 kabupaten tersebut ada 2 kabupaten baru yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Kabupaten Balangan dan di Kabupaten Kotabaru adalah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga saat ini terdiri dari Kota; Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Seatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Penduduk di 13 Kabupaten/Kota

tersebar secara tidak merata dengan jumlah terbesar di Kota Banjarmasin sebanyak 625.481 jiwa, dan Kabupaten Banjar 506.839 jiwa, karena luasan daerah di Kalimantan Selatan sangat beragam maka kepadatan penduduk juga tidak merata dan jumlah terpadat adalah di Kota Banjarmasin 8.607 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan daerah yang paling jarang penduduknya di Kabupaten Kotabaru 31 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2017d).

Penduduk adalah subyek sekaligus juga obyek pembangunan dan tujuan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, salah satu ukuran untuk tingkat kesejahteraan adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan pengamatan tahun 2016 Kota Banjarmasin (75,94) dan Banjarbaru (77,96) sebagai daerah dengan IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara (63,38) dan Barito Kuala (64,33) adalah daerah dengan IPM terendah. Secara umum kondisi IPM di Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sementara IPM di tingkat Nasional tahun 2016 sebesar 70,18 dan Kalimantan Selatan 69,05 di bawah angka Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Kondisi IPM dapat dilihat pada Gambar 1.1.

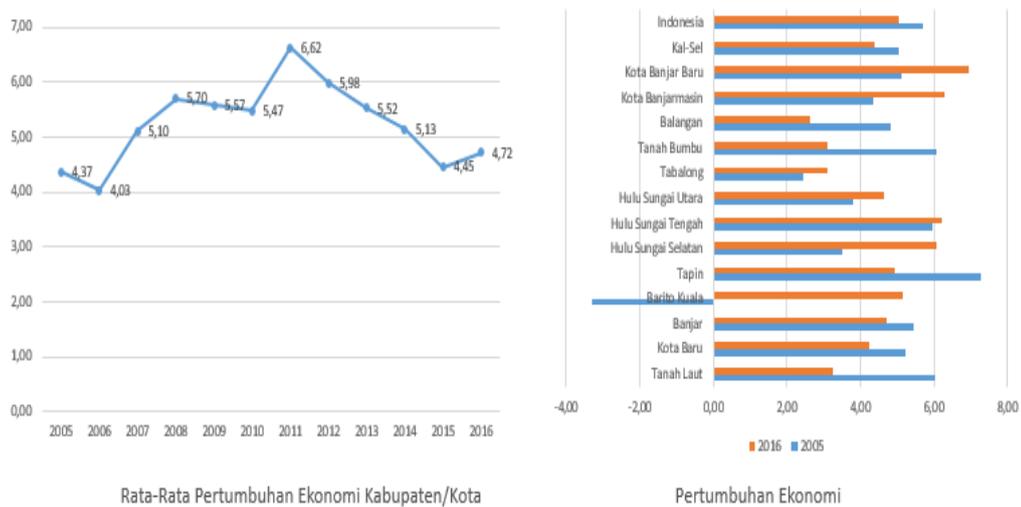


Sumber : BPS (2018b)

Gambar 1.2. Rata-rata IPM dan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam pertumbuhan ekonomi, dimana melalui pertumbuhan ekonomi tergambar peningkatan kapasitas produksi perekonomian daerah yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah, dengan ukuran umum yang biasa digunakan adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Kondisi perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sama selama 12 tahun pengamatan, secara umum pertumbuhannya selama 6 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan meskipun di tahun 2016 mulai meningkat, daerah dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2016 Kota Banjarbaru (6,94%) dan Banjarmasin (6,28) diatas pertumbuhan provinsi (4,40) dan nasional (5,03). Banyak hal yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan adalah turunnya harga komoditas Batubara di pasaran global hal ini terlihat dari trend penurunan kondisi perekonomian dan tahun 2016 ketika terjadi peningkatan harga komoditas batu bara

pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend yang meningkat, trend dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.2.

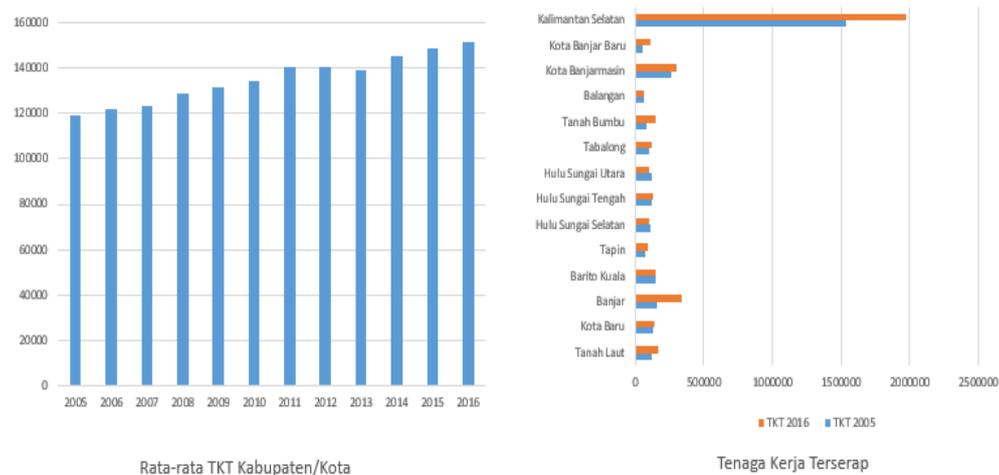


Sumber: BPS (2008b, 2010b, 2012b, 2016b)

Gambar 1.3  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (%)

Selain angka pertumbuhan ekonomi sebagai salah indikator keberhasilan pembangunan, secara makro juga dapat dilihat dari besarnya tenaga kerja terserap sebagai gambaran dari keberhasilan pembangunan dalam hal mengurangi jumlah pengangguran, dan karena daya beli sebagai salah satu komponen pembentuk indeks komposit IPM maka melalui tenaga kerja terserap dapat menggambarkan seberapa banyak jumlah orang yang mendapatkan imbal jasa yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, disamping yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik.

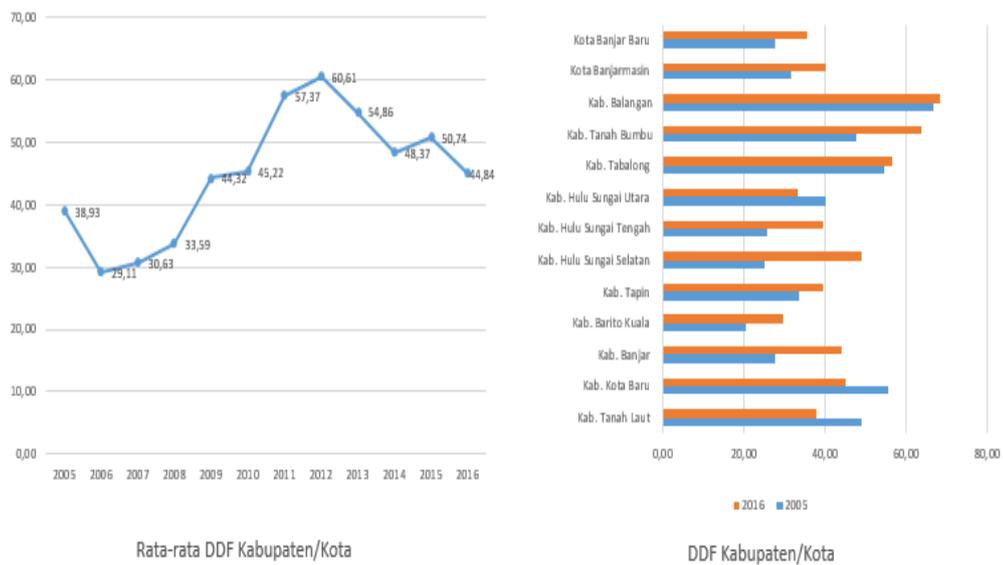
Menurut data statistik dasar jumlah penduduk yang bekerja pada kabupaten/kota diketahui secara rata-rata jumlah tenaga kerja terserap menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, jika dilihat dari besarnya jumlah tenaga kerja terserap tahun 2016 maka Kabupaten Banjar memiliki angka yang tertinggi yakni 343.311 jiwa dan Kota Banjarmasin 299.144 jiwa, sementara daerah yang jumlah tenaga kerja terserapnya rendah adalah di Kabupaten Balangan 60.681 jiwa dan Kabupaten Tapin 88.869 jiwa, Jumlah tenaga kerja terserap dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: BPS (2017b)

Gambar 1.4  
Jumlah Tenaga Kerja Terserap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Perekonomian daerah dan jumlah tenaga kerja terserap pada masing-masing Kabupaten/Kota tadi tidak akan terbentuk tanpa campur tangan dari peran pemerintah dan swasta yang menjadi motor penggerak perekonomian, dan sejak diberlakukannya UU No. 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara otonom. Peran pemerintah dalam perekonomian di era desentralisasi fiskal ini dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, salah satu ukuran yang bisa digunakan adalah melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Besarnya DDF sangat variatif antar daerah mengingat komponen pembentuknya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBPBP) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LPAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD), jadi akan ada daerah dengan DDF yang tinggi dan ada pula yang rendah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 daerah dengan DDF yang tinggi adalah di Kabupaten Balangan (68,54%), dan Kabupaten Tanah Bumbu (63,64%) dan daerah dengan DDF yang rendah Kabupaten Barito Kuala (29,76%) dan Hulu Sungai Utara (33,25%), secara rata-rata DDF Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang menurun, lihat Gambar 1.4



Sumber : BPS (2006, 2011a, 2012a, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2017a)

Gambar 1.5  
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Peran pemerintah yang di proxy dengan DDF untuk menggerakkan roda perekonomian, juga harus didukung oleh peran swasta dalam bentuk investasi swasta, berdasarkan pengamatan tahun 2005 hingga 2016 investasi swasta menunjukkan trend terus meningkat namun dengan sebaran yang sangat tidak merata, tahun 2016 daerah dengan investasi tertinggi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, yang terendah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin. sebaran realisasi investasi swasta yang tidak merata tentunya merupakan sesuatu yang alami karena keinginan investor untuk berinvestasi adalah bersifat rasional yakni bergantung pada kemungkinan untuk memperoleh profit yang besar, sebagai ibukota Kota Banjarmasin tentunya sangat menarik sebagai pusat berbagai kegiatan. Realisasi Investasi Swasta dapat di lihat pada Gambar 1.5.



Sumber : Bank Indonesia (2017)

Gambar 1.6  
Realisasi Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Peranan pemerintah dan swasta yang diharapkan jadi motor penggerak perekonomian diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja terserap yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagaimana pengalaman yang pernah dialami oleh negara lain serta kabupaten/kota lainnya di Indonesia bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan para ahli sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Berikut beberapa penelitian yang hasilnya menunjukkan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang negatif dan bermasalah seperti Fauziah (2007), dengan kasus Indonesia melibatkan 367 Kabupaten/Kota pada periode 1991-2005. Studi menggunakan dua metode pengukuran desentralisasi yaitu rasio sumber pendapatan daerah dan rasio pengeluaran. Ditemukan desentralisasi penerimaan di Indonesia cenderung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan desentralisasi tidak diperoleh dengan hanya memberikan kewenangan lebih besar termasuk bidang keuangan kepada pemerintah daerah. Penting kiranya untuk mengembangkan lingkungan yang cocok bagi berlangsungnya desentralisasi termasuk melihat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pepinsky dan Wihardja (2009) dengan data 2001 – 2007 tingkat Kabupaten/Kota memasukkan dua mekanisme yakni persaingan antar jurisdiksi dan akuntabilitas demokrasi. Berdasarkan itu, terlihat *heterogenitas endowment*, faktor mobilitas kapital dan modal, dan ukuran kelembagaan. Temuan studi menunjukkan bahwa desentralisasi tidak memberikan efek bagi kinerja ekonomi Indonesia yang diukur melalui produk domestik bruto. Suatu negara yang melakukan desentralisasi harusnya memiliki wilayah yang relatif sama, mobilitas tenaga kerja dan modal tinggi, serta akuntabilitas pemimpin lokal. Pengalaman pelaksanaan desentralisasi negara Indonesia menunjukkan ketiga hal itu tidak efektif.

Davoodi dan Zou (1998) melakukan riset dengan menggunakan data dari negara maju dan negara berkembang. Hasil riset menunjukan terdapat korelasi negatif dinegara berkembang dan tidak berkorelasi di negara maju. Riset dilakukan dengan menggunakan data dari 46 negara, periode penelitian 1970-1998 dengan menggunakan *expenditure share* yang diregresikan dengan menggunakan regresi linier sederhana. Variabel determinan pertumbuhan ekonomi yang digunakan yaitu tarif pajak efektif, pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita, tingkat investasi dan *human capital*.

Zulyanto (2010) studi bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari level awal pertumbuhan, pertumbuhan penduduk, investasi, dan human capital. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat bentuk *hump-shaped (a hump-shaped relation)* dalam pengaruh desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu. Artinya pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampaui tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada derajat desentralisasi fiskal terlampaui tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal justru akan menghambat

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah dengan derajat desentralisasi rendah seperti Kabupaten Kaur dan Lebong perlu meningkatkan derajat desentralisasi fiskal karena peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara daerah dengan derajat desentralisasi tinggi seperti Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya tidak melakukan kebijakan yang berorientasi pada usaha peningkatan derajat desentralisasi fiskal, karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi sebaiknya justru lebih berfokus untuk melakukan kebijakan efisiensi dan efektifitas pada anggaran pengeluaran pemerintah karena akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumadi (2013) Penelitian ini menggunakan data panel seluruh daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2010, dengan SEM untuk mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, pembangunan fisik serta faktor input terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan manusia/Human Development; Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan fisik/Physical Development; Pembangunan manusia/Human Development terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal; Pembangunan fisik/Physical Development terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal; dan Faktor Input terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal.

Rodríguez-Pose and Kroijer (2009) menggunakan pendekatan data panel dengan efek dinamis, hubungan antara tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi di 16 Negara-negara Eropa Tengah dan Timur selama periode 1990-2004. Temuannya menunjukkan bahwa, bertentangan dengan pandangan mayoritas, ada hubungan negatif yang signifikan antara dua dari tiga indikator desentralisasi fiskal termasuk dalam analisis dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penggunaan perbedaan waktu yang berbeda memungkinkan kita untuk memberi nuansa negatif ini dan menunjukkannya efek jangka panjang bervariasi tergantung pada jenis desentralisasi yang dilakukan di masing-masing negara-negara sejalan dengan temuan Zhang dan Zou (2001), Rodden (2002), Thießen (2003), dan Rodríguez-Pose dan Bwire (2004). Meskipun desentralisasi sering dikaitkan dengan peningkatan tingkat inovasi kebijakan, transparansi yang lebih besar, dan kapasitas yang lebih baik pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, mungkin sulit untuk menghubungkannya dengan peningkatan kinerja ekonomi. Terutama di negara-negara yang kekurangan lembaga yang sesuai, sistem hukum, dan sumber daya manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mungkin naik sebagai akibat langsung dari desentralisasi fiskal. Memang sebaliknya Kasus lebih mungkin terjadi dengan desentralisasi memiliki efek yang merugikan pada ekonomi keseluruhan suatu negara.

Penelitian yang dilakukan Baskaran dan Felds (2009) untuk mengukur desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan. Begitupun, beberapa kajian menunjukkan bahwa desentralisasi

pendapatan tidak memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa bukti bahwa pengawasan sub-federal atas pajak bersama memicu pertumbuhan ekonomi lebih ekonomis. Di sisi lain, tingginya tingkat politik yang bukan unit otonomi fiskal sub-federal telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa penting untuk membedakan antara otonomi politik dan fiskal pemerintah pada tingkat yang lebih rendah, ketika mendiskusikan apakah desentralisasi meningkatkan atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Otonomi politik tampaknya berbahaya karena, menambah pemain veto.

Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2010) menganalisis hubungan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi di 21 negara OECD desentralisasi fiskal tampaknya menyebabkan lebih banyak kerugian dibandingkan kebaikan dari perspektif pertumbuhan, hubungan antara desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi adalah negatif, signifikan dan kuat dengan dimasukkannya pengukuran desentralisasi politik dan administrasi serta sejumlah variabel kontrol selama periode antara 1990 dan 2005.

Desentralisasi fiskal yang dirancang dengan kurang baik dapat juga menciptakan suatu stimulus bagi pemerintah lokal *sustainable*, besarnya struktur fiskal suatu negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan penerapan desentralisasi fiskal memiliki hubungan timbal balik yang lemah antara tingkat penerimaan daerah (*level of revenue decentralization*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (*economic growth rates*) (Phillips dan Woller, 1997).

Desentralisasi dapat juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk melakukan pengeluaran yang kurang bertanggungjawab dan tidak daerah. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah daerah tidak mampu menangkap apa yang menjadi *local people needs* dan *local characteristics* masing-masing daerahnya Martinez, V., Jorge, M, dan McNab, R (2001). Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan *trade off* hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara-negara sedang berkembang bermasalah Zhang dan Zou (2001) efek desentralisasi terhadap pertumbuhan sangat bergantung pada sifat dari lembaga administrasi dan sistem politik setempat Andrea dan Agnese (2013).

Beberapa artikel dan studi yang hasilnya menunjukkan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif seperti yang dilakukan oleh Oates (1993), Bird (1993), menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan dan pengeluaran dapat meningkatkan efisiensi dari sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama kontribusi dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kusuma, 2016).

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan GDP per kapita, produktivitas atau modal manusia adalah positif dan secara statistik signifikan, sedangkan hubungan dengan investasi tidak signifikan Blochliger (2013). Mendukung hipotesis adanya ketergantungan anggaran kabupaten dan kota terhadap dana transfer dari pusat, nisbah DAU riil/APBD riil terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi kabupaten dan kota, kapasitas kelembagaan kabupaten dan kota, desentralisasi sektor kesehatan dan desentralisasi sektor pendidikan terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap perkembangan IPM kabupaten dan kota. Sunoto (2013). Pengaruh

desentralisasi fiskal pada pembangunan ekonomi menunjukkan hubungan kuat untuk desentralisasi pendapatan dari desentralisasi pengeluaran (Irena, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peranan pemerintah dan swasta di era desentralisasi fiskal, dengan judul “Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan judul penelitian, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta terhadap Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman tentang dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan referensi dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi terutama menyangkut dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai acuan bagi penelitian lanjutan khususnya aspek hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan tenaga kerja terserap serta kesejahteraan masyarakat.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Studi Teoritis dan Empiris

Pada bagian ini peneliti akan mereview beberapa teori dan bukti empiris yang menjadi dasar penelitian ini, sebagai berikut;

#### 2.1.1. Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara sempit dapat diartikan dengan meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan dengan instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi serta masyarakat itu sendiri yang dapat berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian.

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional Keynes, dalam Sukirno (2012) merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan otonomi diserahkan kepada daerah dalam pengelolaannya. Pengeluaran pemerintah ini mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots(2.1)$$

yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pengeluaran rutin pemerintah digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan mengarah kepada konsumsi, sedang pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi.

Wagner dalam Mangkoesobroto (2013), mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, hubungan antara keduanya secara timbal balik adalah positif.

Teori Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesobroto (2013), pengeluaran pemerintah menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Menurut Rossen (2002), ruang lingkup keuangan publik mencakup keuangan publik, negara, dan ideologi, kesejahteraan ekonomi (*welfare economic*), pengeluaran publik (barang publik dan eksternalitas, politik ekonomi, pendidikan, analisis bagaimana sistem perpajakan dan struktur perpajakan, penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan kerangka normatif keuangan publik, di

dalamnya mencakup kesejahteraan ekonomi (*welfare economics*), sebagaimana kasus pada cabang-cabang ekonomi lainnya salah satu teori ekonomi yang memusatkan kajian pada kesejahteraan sosial bagi alternatif ekonomi pemerintah. Kesejahteraan ekonomi memfokuskan pada kondisi-kondisi dimana alokasi sumber-sumber ekonomi mencapai efisiensi Pareto.

Salah satu fungsi pemerintah dalam perekonomian adalah fungsi distribusi Romer (1986), yaitu peran pemerintah dalam perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat, dengan kata lain pemerintah menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses sumber-sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Fungsi ini berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2013) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Peranan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tahap awal perkembangan ekonomi dimana persentase investasi pemerintah terhadap investasi total adalah lebih besar, mengingat pada tahap ini diperlukan pembangunan prasarana sampai pada tahap menengah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Meskipun investasi swasta pada tahap ini sudah semakin besar yang diikuti dengan kegagalan pasar sehingga diperlukan peranan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik.

Menurut Mankiw (2007) dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya dan investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya Mankiw (2007). Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Solow (1956) dalam Arsyad (2010), besarnya investasi per pekerja adalah fungsi dan *capital stock* per pekerja. Besar kecilnya *capital stock* dipengaruhi oleh investasi serta depresiasi atau penyusutan. Ketika investasi naik, *capital stock* akan bertambah, dan sebaliknya. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap bertambahnya *capital stock*. Pertambahan ini selanjutnya akan meningkatkan pendapatan yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertambahan ini tidak akan terjadi terus-menerus. Ketika terjadi *steady-state, level of capital*, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan studi empiris dikemukakan oleh Baskaran dan

Felds (2009) temuannya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan. Hammond dan Tuson (2009) temuannya menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan desentralisasi fiskal berbeda di seluruh metropolitan dan non metropolitan atau kabupaten, desentralisasi dapat mengakibatkan pertumbuhan metropolitan, terutama pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pendapatan.

Rodriguez – Pose dan Kroijer (2009) desentralisasi fiskal melalui pengeluaran dan transfer pada tingkat daerah memiliki korelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan nasional di CEE, Brothaler and Getzner (2010), pengeluaran pemerintah tampaknya mengikuti bentuk terbalik-U yang respek terhadap pendapatan per-kapita, sehingga setidaknya menolak *Wagner's Law*. Karena pada tahap pertama pembiayaan mengalami defisit anggaran (hutang publik meningkat), sehingga mempengaruhi dari siklus bisnis. Desentralisasi fiskal memiliki efek peredam terhadap total pengeluaran, sehingga memperkuat hipotesis efisiensi dari sistem federal.

Gemmell, N., Kneller, R., dan Sanz, I. (2013), pengeluaran desentralisasi cenderung dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah sementara desentralisasi pendapatan telah dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. negara-negara OECD secara substansial lebih banyak tergantung pada belanja dari pada pendapatan dalam pelaksanaan desentralisasi, ini konsisten dengan hipotesis Oates (1972) bahwa keuntungan efisiensi maksimum membutuhkan pertandingan antara desentralisasi pengeluaran dan pendapatan.

Hendarmin (2012), variabel belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Andrea dan Agnese (2013) efek desentralisasi terhadap pertumbuhan sangat bergantung pada sifat dari lembaga administrasi dan sistem politik setempat. Irena (2014), dampak positif dan signifikan desentralisasi pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi, desentralisasi pendapatan tampaknya memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi, Kusuma (2016), Desentralisasi fiskal di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama kontribusi dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sow dan Razafimahefa (2015), desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Pertama, proses desentralisasi membutuhkan lingkungan politik dan kelembagaan yang memadai. Kedua, tingkat yang cukup desentralisasi pengeluaran tampaknya diperlukan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Ketiga, desentralisasi pengeluaran harus disertai dengan desentralisasi pendapatan yang cukup. Jika kondisi tersebut tidak ada, maka desentralisasi fiskal dapat memperburuk efisiensi pelayanan publik, Blochliger (2013), hubungan antara desentralisasi fiskal dan GDP per kapita, produktivitas atau modal manusia adalah positif dan secara statistik signifikan. Badrudin dan Baldrice (2015) menunjukkan bahwa otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### **2.1.2. Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terserap**

Menurut Rossen (2002) bahwa anggaran penerimaan dan belanja negara berpengaruh dari terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas

harga-harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja. Solow dalam Arsyad (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output, pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan sedangkan teknologi dianggap konstan (tidak berubah), pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran seperti yang dikemukakan Hayek dalam Khusaini (2006) tentang *knowledge society*, sehingga dalam hal pengkombinasian modal yang berasal dari pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien, karena daerah dianggap yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan termasuk dalam hal menyediakan kesempatan kerja.

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang lebih stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBD secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Rostow dan Musgrave tentang tahapan perkembangan pengeluaran pemerintah dalam Mangkoesoebroto (2013), yang relevan untuk peranan investasi terhadap tenaga kerja terserap adalah perkembangan pengeluaran pemerintah pada tahap menengah, pada saat peranan investasi swasta semakin besar maka tenaga kerja terserap juga semakin besar. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa jika investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar, maka presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil, dan sebaliknya.

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara Mankiw (2003). Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan empiris yang menggambarkan hubungan variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap tenaga kerja terserap seperti yang dikemukakan oleh Hammond dan Tosun (2009) bahwa desentralisasi dapat mengakibatkan pertumbuhan metropolitan, terutama pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pendapatan (dimana fragmentasi *single-purpose* pemerintah meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja, sementara sentralisasi penerimaan mengurangi pertumbuhan pendapatan, Hendarmin (2012), pengaruh modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap kesejahteraan sosial di 12 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2005-2009 Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap lapangan kerja dan investasi swasta berpengaruh positif terhadap lapangan kerja tetapi tidak signifikan.

### **2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Terserap dan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menurut Todaro and Smith (2013), menunjukkan hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik

meliputi; pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti, makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dicapai jika ada usaha untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang secara makro digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya angka pengangguran, Analisis mazhab klasik berkisar pada proses akumulasi pembentukan modal secara akumulatif (modal fisik maupun dana) seperti yang dikemukakan Kaldor, proses akumulasi tercipta oleh adanya surplus antara hasil produksi, konsumsi dalam masyarakat atau tabungan. Tabungan dilakukan dengan maksud untuk disalurkan sebagai investasi untuk menambah alat-alat produksi, menambah modal fisik dan dana. Melalui proses akumulasi, maka kemampuan memproduksi meningkat (Djojohadikusumo,1994). Sama dengan yang disampaikan oleh Harrod Domar dalam Arsyad (2010) mengemukakan bahwa setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal.

Berkembangnya teori tentang pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dimana Solow menjelaskan bahwa investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk, serta teknologi berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pertumbuhannya. Adapun model dasar dari teori pertumbuhan Solow adalah

$$Y = f(K.L)..... (2.3)$$

dimana Y = output  
K = modal fisik  
L = angkatan kerja.

Jika kedua sisi dibagi dengan L, maka hasilnya akan:

$$Y = f(K)..... (2.4)$$

dimana : Y = output per pekerja  
K = modal per pekerja (Arsyad, 2010).

Dari persamaan di atas, diketahui bahwa, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan modal serta pertumbuhan penduduk atau populasi. Karena penambahan modal atau kapital dipengaruhi oleh besarnya tabungan serta adanya depresiasi modal. Maka dalam periode tertentu penambahan modal atau kapital bisa menjadi nol. Ini disebabkan nilai kapital, baik yang terbentuk maupun yang terdepresiasi, adalah sama. Dalam lingkup makro, kondisi ini bisa menyebabkan perekonomian berada dalam kondisi stabil dengan penghasilan yang tetap, diasumsikan bahwa variabel lain atau menjadi variabel bebas. Pada fungsi produksi,

teknologi dianggap *given* atau tetap dan tingkat penawarannya berada pada posisi tertentu.

Teori Neoklasik yang dikemukakan Solow dalam Arsyad (2010) diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dunia industri berlaku fungsi produksi yang tertuang dalam hukum *The Law of Diminishing Return*. Hukum ini menjelaskan bahwa ditambahkannya jumlah input yang tepat bisa menambah output yang maksimal. Tetapi, jika penambahan terus dilakukan, maka yang terjadi adalah penurunan dari output itu sendiri.
2. Berkaitan dengan investasi, besarnya investasi per pekerja adalah fungsi dari *capital stock* per pekerja. Besar kecilnya *capital stock* dipengaruhi oleh investasi serta depresiasi atau penyusutan. Ketika investasi naik, *capital stock* akan bertambah, dan sebaliknya. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap bertambahnya *capital stock*. Pertambahan ini selanjutnya akan meningkatkan pendapatan yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertambahan ini tidak akan terjadi terus-menerus. Ketika terjadi *steady-state level of capital*, pertumbuhan ekonomi akan melambat.
3. Pergerakan naik turunnya tingkat populasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan bertambahnya tingkat populasi, jumlah *labour* atau pekerja yang meningkat mampu mengurangi *capital stock* per pekerja dengan sendirinya. Berdasarkan analisis Mankiw (2007), negara-negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat, GDP perkapitanya rendah.
4. Kemajuan di bidang teknologi dimasukkan sebagai faktor eksogen. Dampak dari kemajuan teknologi ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* atau berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja. Hanya dalam kondisi *steady-state*, pertumbuhan output per pekerja hanya tergantung dari kemajuan teknologinya.
5. Makin tinggi tingkat tabungan atau *saving rate* suatu negara, makin kaya negara tersebut. Selain itu, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan semakin tinggi juga tingkat kemiskinannya.

Beberapa hal yang bisa ditempuh dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Solow dalam Arsyad (2010), yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah tabungan, dengan bertambahnya tabungan, modal yang tersedia untuk berinvestasi akan semakin besar dan ini artinya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2. Setelah tingkat tabungan terus ditambah, jumlah investasi yang sesuai dengan potensi dan kondisi perekonomian, baik dari segi fisik maupun nonfisik juga meningkat.
3. Meningkatkan aspek kemajuan teknologi, dengan melakukan ini, pendapatan per tenaga kerja juga bisa meningkat, sehingga mampu memberi kesempatan pada sektor swasta untuk berinovasi. Adanya inovasi yang terus dikembangkan akhirnya juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Model dasar teori pertumbuhan ekonomi tahun 1990-an masih bertolak dari paradigma ekonomi Neoklasik yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan produktivitas total faktor produksi (*total*

*factor productivity*) Solow dalam Arsyad (2010). Bila fungsi produksi sebuah perekonomian berbentuk Cobb-Douglas (dengan ciri-cirinya), maka:

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana Y adalah output, A adalah teknologi, K adalah modal fisik, dan L adalah tenaga kerja, dan  $\alpha$  adalah proporsi (*share*) input. Dalam keadaan kompetitif proporsi ini sama dengan elastisitas output berkenaan dengan modal dan tenaga kerja. Jadi model (1) mengatakan bahwa perubahan output dipengaruhi oleh teknologi, modal, dan tenaga kerja. Perkembangan teknologi yang ditentukan dari luar model dan bersifat *labour augmenting technology* karena peningkatan output akibat perubahan tenaga kerja. Di samping perkembangan teknologi yang bersifat eksternal, model (1) juga mengandaikan bahwa tingkat tabungan bersifat eksogen.

Pertumbuhan endogen, Romer (1986) menawarkan paradigma pertumbuhan endogen yang memiliki tiga elemen dasar. Pertama, perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan. Dengan kata lain, perubahan teknologi ditentukan dari dalam model itu sendiri. Di sini pengetahuan dilihat sebagai bentuk baru modal yang berbeda dengan modal fisik (*physical capital*). Kedua, penciptaan ide baru oleh sebuah perusahaan, misalnya mempunyai ciri eksternalitas yang positif. Artinya, ide baru tidak bisa dipatenkan secara ketat dan karena itu ide atau pengetahuan baru tersebut secara potensial akan menyebar ke perusahaan lain sehingga akan ikut mendorong juga kemampuan produksi perusahaan lain tersebut. Ketiga, produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan (*stock of knowledge*) dan input-input lain mempunyai ciri *increasing returns* di mana proporsi peningkatan output melebihi proporsi peningkatan pengetahuan dan input-input lain, yaitu  $\alpha > 0$ . Artinya, pengetahuan atau ide-ide mempunyai ciri *increasing marginal* produk karena pertumbuhan ide atau pengetahuan tidak mempunyai batas. Ketiga elemen ini eksternalitas, *increasing returns* produksi output dan *decreasing returns* dalam produksi pengetahuan baru menjadi titik sentral dari teori pertumbuhan ekonomi endogen. Secara sederhana, paradigma pertumbuhan endogen dapat diuraikan dalam model (2) berikut.

$$Y = AK \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana A adalah teknologi, Y dan K masing-masing adalah output dan modal. Modal dalam hal ini bisa diperluas untuk mencakup juga sumber daya manusia yaitu pendidikan. Implikasi model (2) adalah bahwa sumber daya manusia memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi endogen melalui penciptaan ide-ide baru, termasuk juga kegiatan riset dan pengembangan.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan literatur ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Karena Produk Domestik Bruto sering dianggap oleh para ekonomi sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Ada dua cara untuk mengukur pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Salah satunya dengan melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain untuk melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2007). Dari sudut pandang tersebut, jelaslah PDB merupakan cerminan dari kinerja ekonomi. Demikian pula, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Pembangunan ekonomi daerah yang direfleksikan oleh tingkat Pertumbuhan Domestik Regional

Bruto (PDRB). Pemahaman akan pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah tersebut hampir sama dengan teori pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

Teori Klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith dalam Arsyad (2010), juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Kaum Klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full employed*). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Ketersediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak.

Kritikan Keynes dalam Sukirno (2012) terhadap sistem Klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (*adjustment*) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labour union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marginal tenaga kerja (*marginal value of productivity of labor*), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marginal dari tenaga kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas.

Analisis Keynes berkembang sebagai suatu usaha untuk menerangkan bahwa suatu perekonomian akan selalu menghadapi masalah pengangguran dan berkeyakinan bahwa pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ini dan mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut Keynes sistem pasar bebas tidak akan secara otomatis membuat penyesuaian-penyesuaian dalam kegiatan perekonomian sehingga pada akhirnya mengakibatkan tercapainya kesempatan kerja penuh dalam jangka panjang.

Golongan New Keynes mendukung pandangan Keynes diatas yakni (1) pengangguran selalu akan ada (terjadi), dan (2) pemerintah perlu secara aktif menjalankan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran (inflasi) dan mewujudkan kesempatan kerja penuh. Mereka tidak sepenuhnya menolak pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh golongan New Klasik tentang (1) sikap pelaku ekonomi yang mempunyai ekspektasi yang rasional dalam menghadapi ekonomi saat ini dan yang akan datang. Para pekerja dan pengusaha akan menjalankan kegiatan yang rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan dan keuntungan, (2) perlunya menyandarkan teori ekonomi makro kepada aspek yang sama dalam teori ekonomi mikro, bentuk pasar tenaga kerja dalam teori makro ekonomi perlu disesuaikan dengan pasar tenaga kerja dalam teori mikro ekonomi.

Pendapat Keynes dalam mengatasi pengangguran bahwa kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter, karena pertumbuhan pendapatan nasional cukup besar dibandingkan kenaikan suku bunga yang relatif kecil. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa; (1) Sensitivitas permintaan uang untuk spekulasi, ketika perubahan suku bunga terjadi akan menimbulkan perubahan yang besar pada permintaan uang untuk spekulasi dan atau permintaan uang secara keseluruhan, akibatnya kurva permintaan uang elastis/landai, (2) Keinginan pihak swasta untuk melakukan investasi ditentukan oleh banyak faktor seperti suku bunga, tingkat pengembalian modal, kemajuan ekonomi dan ramalan mengenai ekonomi dimasa yang akan datang, tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhannya.

Teori Harrod Domar dalam Arsyad (2010) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow dimana dalam model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsikan tumbuh secara geometris dan *full employment* selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.

Ester Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat dan meningkatnya output di sektor pertanian. Boserup dalam Mulyadi (2003), juga berpendapat bahwa penambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerja banyak. Pertumbuhan penduduk justru mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru.

Dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an dan pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau *supply-side economics*, yang memfokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena

modal ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, artinya dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, untuk memaksimalkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja dengan cara memaksimalkan tingkat tabungan dan investasi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menurut Keynes dalam Sukirno (2013) bisa dicapai melalui peranan pengeluaran agregat, Keynes menunjukkan pentingnya peranan dari pengeluaran agregat atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Keynes membagi permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan penanaman modal para pengusaha, dalam perkembangannya pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada empat komponen konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor (X). Pengeluaran pemerintah adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan fungsi pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian, karena terjadinya ketidaksempurnaan pasar, mazhab Keynes (Neo Klasik) hingga New Keynes berkeyakinan bahwa kebijakan pemerintah masih diperlukan untuk menstabilkan perekonomian.

Pengurangan pengangguran melalui tenaga kerja terserap adalah suatu langkah yang ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan menurut Smith dalam Arsyad (2010) kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Seperti yang dikemukakan Solow, perubahan output dipengaruhi oleh teknologi, modal, tenaga kerja. Perkembangan teknologi yang ditentukan dari luar model bersifat *labour augmenting technology* karena peningkatan output akibat perubahan teknologi menyerupai peningkatan output akibat perubahan tenaga kerja. Di samping perkembangan teknologi yang bersifat eksternal, model ini juga mengandaikan bahwa tingkat tabungan bersifat eksogen, berdasarkan teori Solow peranan tenaga kerja terserap memiliki peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang tentunya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan pada masa pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), jika pembentukan modal dilakukan pada suatu waktu maka pada waktu berikutnya perekonomian mampu memproduksi barang-barang dalam jumlah lebih besar, hal ini akan menambah besar kesempatan kerja yang pada gilirannya akan diterima masyarakat dalam bentuk pendapatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka (Harrod dan Domar, dalam Arsyad, 2010).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat secara empirik, berdasarkan penelitian yang dilakukan seperti temuan Hadi (2009) bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki efek positif dan berpengaruh signifikan, hubungan antara desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terserap memiliki efek negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Hendarmin (2012) temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta melalui pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan kemiringan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai negatif, Badrudin dan Baldrice (2015) temuannya menyatakan

bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **2.2. Posisi Penelitian ini terhadap Penelitian-penelitian Terdahulu**

Keterbaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan indikator untuk mengukur variabel desentralisasi fiskal yakni dengan derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio/persentase Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak tambah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Total Pengeluaran Daerah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel desentralisasi fiskal diukur dengan cara yang berbeda, seperti Tasrin dan Wulandari (2012) untuk mengukur Desentralisasi Fiskal menggunakan persentase rasio pengeluaran pemerintah daerah dari pengeluaran total pemerintah secara nasional, Gemmell, N., Kneller, R., dan Sanz, I. (2013) pengeluaran langsung rasio variabel pengeluaran daerah dikurangi transfer dari pemerintah pusat terhadap pengeluaran pemerintah umum konsolidasi, pengeluaran yang dibiayai sendiri adalah rasio pengeluaran daerah dikurangi hibah untuk pemerintah lain terhadap pengeluaran pemerintah umum konsolidasi.

Blochliker (2013) indikator untuk mengukur desentralisasi terdiri dari

- Desentralisasi pengeluaran (rasio pengeluaran pemerintah daerah ke pemerintah pusat);
- Desentralisasi pendapatan (rasio pendapatan daerah sendiri terhadap pendapatan pemerintah umum);
- Desentralisasi penerimaan pajak (rasio penerimaan pajak sub-pusat dengan penerimaan pajak pemerintah umum);
- Otonomi pajak (rasio pajak di mana SCG memiliki otonomi dasar atau penetapan tarif terhadap pendapatan pajak pemerintah umum),

Serta pendekatan yang digunakan Badrudin dan Baldric (2015) mengukur desentralisasi fiskal rasio total pendapatan lokal, ditambah penerimaan pajak dan bukan pajak terhadap total belanja.

## BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### 3.1. Kerangka Konseptual

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui proses pembangunan, pembangunan ekonomi secara makro digambarkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran melalui jumlah tenaga kerja terserap, untuk menggerakkan roda perekonomian dalam mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan peranan pemerintah dan swasta, peranan pemerintah dalam era desentralisasi dengan pelimpahan kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur alokasi anggaran, dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk derajat desentralisasi fiskal yakni kemampuan membiayai pengeluaran daerah melalui PAD, BHPBP dan LLPAD dan peranan swasta dalam bentuk Investasi swasta, untuk kemudian memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dan jumlah tenaga kerja terserap yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Ada 3 tujuan dalam penelitian dilakukan yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan teori dalam hal ini adalah sebagai berikut; menurut Keynes dalam Sukirno (2012) hubungan ini dikarenakan dalam perekonomian diperlukan peranan pemerintah yang tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada mekanisme pasar dimana pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi yang dinyatakan dalam persamaan identitas yang menjadi legitimasi peranan pemerintah dalam perekonomian, menurut Wagner dalam Mangkoesoebroto (2013) terdapat hubungan positif antara pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah, ketika pendapatan perkapita meningkat maka pengeluaran pemerintah akan meningkat pula, Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2013) berpendapat sama bahwa pendapatan meningkat akan diikuti peningkatan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah akan semakin besar, Musgrave dan Rostow dalam Mangkoesoebroto (2013) pada tahap awal perekonomian investasi pemerintah lebih besar dari investasi swasta, dan tahap menengah investasi swasta lebih besar namun karena terjadi kegagalan pasar maka investasi pemerintah juga meningkat untuk menyediakan barang publik, Rossen (2002) penyerahan kewenangan kepada daerah adalah wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, Mankiw (2007) tentang investasi adalah penggerak roda perekonomian, Solow dalam Arsyad (2010), besarnya investasi per pekerja adalah fungsi dan *capital stock* per pekerja, besar kecilnya *capital stock* dipengaruhi oleh investasi, beberapa studi empirik yang memperkuat antara lain Baskaran dan Felds (2009), Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009), Hammond dan Tosun (2009), Brothaler dan Getzner (2010), Gemmell et al (2013), Andrea dan Agnese (2013), Kusuma (2016), Irena (2014), Sow dan Razafimahefa (2015), Tasrin dan Wulandari (2012) dan Hendarmin (2012).

Tujuan kedua, mengetahui dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap tenaga kerja terserap, Hubungan ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Rossen (2002) menurutnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpengaruh terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan, peningkatan efisiensi, dan penciptaan kesempatan kerja, menurut Hayek dalam

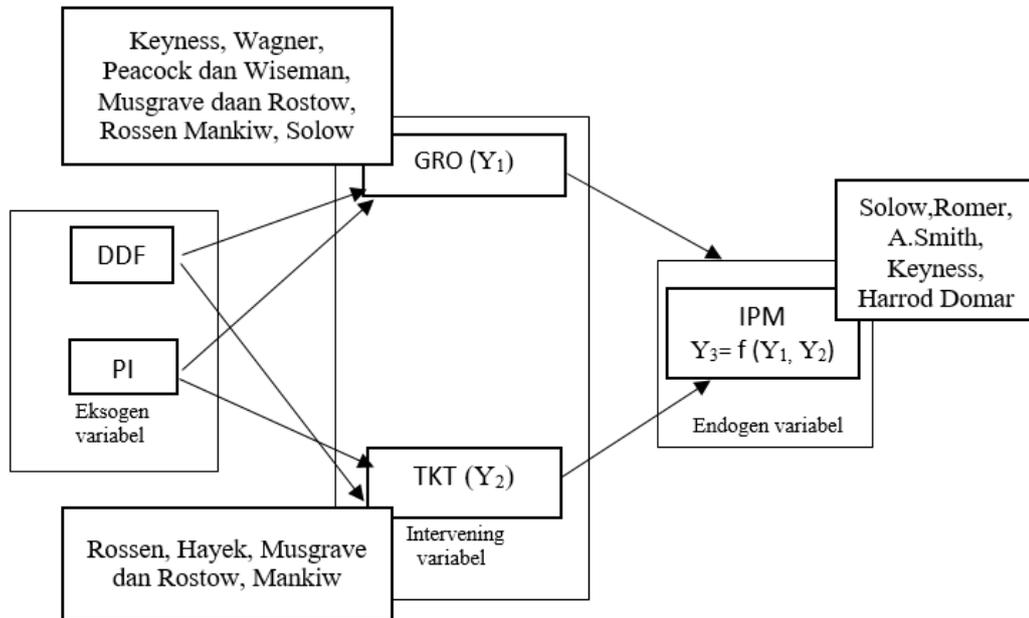
Khusaini (2006) bahwa desentralisasi fiskal sangat penting karena daerah dianggap yang paling mengetahui tentang masyarakatnya (*knowledge in society*) sehingga mereka yang paham kemana harus mengalokasikan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja, dari sisi investasi swasta, menurut pendapat Musgrave dan Rostow dalam Mangkoesobroto (2013) pengeluaran pemerintah pada tahap menengah akan meningkat seiring dengan penyediaan barang publik yang semakin banyak karena terjadinya kegagalan pasar sebagai akibat dari investasi swasta yang makin meningkat, hubungan antara keduanya adalah negatif yakni ketika investasi swasta meningkat maka investasi pemerintah akan turun tapi disisi lain dana untuk menyediakan barang publik meningkat, Mankiw (2007) investasi adalah penggerak roda perekonomian yang akan menambah jumlah tenaga kerja terserap seiring dengan bertambahnya investasi dan kegiatan produksi yang semakin besar. Studi empirik yang memperkuat Hammond dan Tosun (2009) dan Hendarmin (2012).

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi, yang memerlukan dukungan dari peranan pemerintah dan swasta dalam bentuk kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah melalui derajat desentralisasi fiskal dan peran swasta dalam investasi swasta, keduanya diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap, kesejahteraan dalam penelitian ini diproksi dengan IPM, didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Solow dalam Arsyad (2010), tingkat perekonomian dan pertumbuhan ditentukan oleh investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja (penduduk) yang menurut persamaan Cobb Douglas perubahan output dipengaruhi oleh perubahan tenaga kerja dan perubahan teknologi dengan asumsi modal dianggap konstan, menurut pendapat Romer (1986) perubahan teknologi bersifat endogen sehingga output adalah fungsi dari kapital, pendidikan menurutnya adalah kapital karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui penemuan ide-ide baru, hal ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Smith dalam Arsyad (2010) bahwa manusia adalah faktor produksi yang utama yang menentukan kemakmuran bangsa, yang diawali dengan alokasi sumber daya manusia baru kemudian kapital, Keynes dalam Sukirno (2012), menurutnya untuk mengurangi pengangguran diperlukan peranan pemerintah dan kebijakan fiskal lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter, Harrod dan Domar dalam Arsyad (2010) investasi akan menentukan permintaan dan menambah kapasitas produksi yang akan berdampak pada kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa studi empirik yang memperkuat antara lain; Martinez, V., Jorge, dan Boex, J. (2001a), Boex dan Jamie (2001), Hadi (2009), Hendarmin (2012), Badrudin Baldrice (2015), Tasrin dan Wulandari (2012).

Temuan yang diharapkan dari disertasi ini mencakup tiga hal pokok yakni kesimpulan yang menunjukkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap jumlah tenaga kerja terserap, pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat, kedua kesimpulan yang berkaitan dengan pengembangan teori dan ketiga, kesimpulan empirik yang akan menunjukkan kontribusi penelitian ini terhadap kebijakan

pemerintah daerah khususnya dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan investasi swasta dalam implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan studi teoritik dan empirik yang dikemukakan sebelumnya diilustrasikan kedalam kerangka konseptual pada Gambar 3.2. berikut:



Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar 3.1. tentang bagan kerangka konseptual variabel dalam penelitian, dapat dibedakan dalam 3 kategori yakni variabel eksogen, variabel endogen dan variabel antara (*intervening variable*). Dengan model penelitian sebagai berikut :

$$Y_{1it} = \beta_0 + \sum \alpha_i DDF_{t-n} + \sum \delta_i PI_{t-n} + \varepsilon_{1it} \dots\dots\dots(3.1)$$

$$Y_{2it} = \beta_0 + \sum \alpha_i DDF_{t-n} + \sum \delta_i PI_{t-n} + \varepsilon_{1it} \dots\dots\dots(3.2)$$

$$Y_{3it} = \delta_0 + \pi_1 GRO_{it} + \tau_1 TKT_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan:

- $\beta_0, \delta_0$  = konstanta
- $\alpha_i, \delta_i, \pi_1, \tau_1$  = koefisien
- $\varepsilon_{it}, \mu_{it}$  = error
- $Y_{1it}$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $Y_{2it}$  = Tenaga Kerja Terserap
- $Y_{3it}$  = Kesejahteraan Masyarakat
- $DDF_{it}$  = Derajat Desentralisasi Fiskal
- $PI_{it}$  = Investasi Swasta
- $GRO_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi (*predicted*)
- $TKT_{it}$  = Tenaga Kerja Terserap (*predicted*)

Variabel eksogen ini merupakan variabel pemula yang memberikan pengaruh kepada variabel lainnya, dalam penelitian ini adalah variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta. Variabel endogen yakni variabel yang

keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen, dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat, variabel antara yakni variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, variabel ini bertindak sebagai variabel endogen sekaligus variabel eksogen, dalam penelitian ini terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap.

Variabel desentralisasi fiskal dan investasi swasta sebagai variabel eksogen dalam penelitian ini merupakan variabel yang mula-mula memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap, pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan penerimaan dan mengalokasikan belanja daerah yang tergambar dalam derajat desentralisasi fiskal sebagai gambaran dari keleluasaan daerah dalam menetapkan alokasi belanja yang ditambah dengan investasi swasta diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja terserap.

Pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat dimana melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah di era desentralisasi fiskal yang diproksi dengan derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta sebagai variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen variabel pertumbuhan ekonomi dan juga variabel endogen tenaga kerja terserap, kedua variabel eksogen ini sekaligus menjadi variabel endogen yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

### **3.2. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya dimulai dari bab pendahuluan dan tinjauan pustaka, hipotesis dalam penelitian disusun sebagai berikut:

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB 4 METODE PENELITIAN

### 4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini metode panel data simultan *statis*, yakni suatu metode yang hasil estimasi variabel pada tahap pertama, digunakan untuk mengestimasi tahap berikutnya, yang biasa disebut dengan *Two stage least Square* (TSLS). Hasil Estimasi akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yakni menjawab hipotesis, melalui pengujian secara statistik dan ekonometrik agar diperoleh suatu kesimpulan sehingga dapat diformulasikan implikasi atas hasil penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

### 4.2. Spesifikasi model

Model yang digunakan dalam menjawab hipotesis penelitian adalah persamaan simultan TSLS (*Two Stage Least Square*) dengan model *Statis data Panel* karena menggunakan variabel sebelumnya untuk meramalkan variabel yang lain dalam hal ini variabel DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal) dan PI (Investasi Swasta) untuk meramalkan variabel GRO (Pertumbuhan Ekonomi *predicted*). Dalam persamaan simultan sangat besar kemungkinan terjadinya korelasi variabel terikat dengan *error term* sehingga regresi biasa sangat potensial untuk menghasilkan tafsiran yang bias dan tidak konsisten karena variabel terikat akan berkorelasi dengan *error term*.

Model *structural* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$Y_{1it} = \beta_0 + \sum \alpha_i DDF_{t-n} + \sum \delta_i PI_{t-n} + \varepsilon_{1it} \dots\dots\dots(4.1)$$

$$Y_{2it} = \beta_0 + \sum \alpha_i DDF_{t-n} + \sum \delta_i PI_{t-n} + \varepsilon_{1it} \dots\dots\dots(4.2)$$

$$Y_{3it} = \delta_0 + \pi_1 GRO_{it} + \tau_1 TKT_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(4.3)$$

Keterangan:

$\beta_0, \delta_0$  = konstanta

$\alpha_i, \delta_i, \pi_1, \tau_1$  = koefisien

$\varepsilon_{it}, \mu_{it}$  = error

$Y_{1it}$  = Pertumbuhan Ekonomi

$Y_{2it}$  = Tenaga Kerja Terserap

$Y_{3it}$  = Kesejahteraan Masyarakat

$DDF_{it}$  = Derajat Desentralisasi Fiskal

$PI_{it}$  = Investasi Swasta

$GRO_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi (*predicted*)

$TKT_{it}$  = Tenaga Kerja Terserap (*predicted*)

Variabel dalam model tersebut terdiri dari variabel eksogen, variabel endogen dan variabel antara/*intervening variable* dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Variabel Eksogen

Adalah variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab di dalam sistem dan tidak dapat ditetapkan hubungan kausalnya, variabel eksogen ini merupakan variabel pemula yang memberikan pengaruh kepada variabel lainnya. Dalam penelitian ini adalah Variabel Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Investasi Swasta (PI).

2. Variabel Endogen  
Adalah variabel yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen, dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat (IPM).
3. Variabel Antara atau *Intervening Variable*  
Adalah variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi variabel lain, variabel ini bertindak sebagai variabel dependen dan variabel independen, dalam penelitian ini terdiri dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (GRO) dan Tenaga Kerja Terserap (TKT).

#### 4.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang dimaksud. Dengan kata lain, definisi operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel (kasus) tersebut di dunia nyata atau di lapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran Sekaran dan Bogie (2013).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)  
Untuk mengukur kinerja atau kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan Musgrave dan Musgrave dalam Sukanto (2001), dalam penelitian ini akan menggunakan proxy berupa derajat desentralisasi fiskal, yang diukur dari sisi pengeluaran daerah sehingga menunjukkan kondisi riil bahwa anggaran betul-betul telah digunakan, dihitung setiap tahun dalam satuan persentase, formulasi Derajat Desentralisasi Fiskal yang dimodifikasi sebagai berikut.

Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

$$DDF = \frac{PAD + BHPBP + LLPAD}{TKD} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BHPBP	= Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak
LLPAD	= Lain-lain pendapatan yang sah
TKD	= Total Pengeluaran Daerah

Semakin besar pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan Lain-lain pendapatan yang sah, maka semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerahnya sehingga derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) makin kuat, sebaliknya jika semakin kecil pendapatan daerah, maka semakin kecil kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerahnya sehingga derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) makin lemah, datanya bersumber dari Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan angka realisasi dalam satuan persen. Proxy ini dengan modifikasi berupa total pengeluaran daerah sebagai faktor pembagi mengingat besarnya anggaran yang benar-benar telah teralisasi adalah tergambar pada besarnya pengeluaran.

2. Investasi Swasta (PI)

Investasi Swasta merupakan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam penelitian ini data investasi swasta yang berasal dari penanaman modal asing dan investasi swasta, terdiri dari modal kerja dan investasi, pemilihan investasi swasta dilakukan untuk menghindari terjadinya *double counting* karena belanja pemerintah sudah masuk dalam perhitungan derajat desentralisasi fiskal, data yang digunakan data realisasi investasi swasta pada tahun yang bersangkutan, bersumber dari Bank Indonesia dalam satuan juta rupiah. Pemilihan investasi swasta yang bersumber dari Bank Indonesia dalam penelitian ini dilakukan karena data dari BKPM tidak lengkap karena tidak semua Kabupaten/Kota menjadi tujuan investasi PMA atau PMDN sehingga data yang tersedia sangat tidak memungkinkan untuk diolah.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi (GRO)

Adalah persentase perubahan nilai output barang dan jasa dari satu tahun ke tahun berikutnya, data yang digunakan adalah GDP Mankiw (2007) dalam penelitian ini digunakan PDRB dengan tahun dasar 2010, yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada Kabupaten/Kota (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha dengan cara perhitungan atas dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga menunjukkan nilai riil (nyata), data bersumber dari publikasi BPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam satuan persentase dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y_1 = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 pada periode t

$PDRB_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 pada periode t yang dikurangi periode sebelumnya.

### 4. Tenaga Kerja Terserap (TKT)

Adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja Kuncoro (2002), dalam penelitian ini diproxy dengan banyaknya orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, selama paling sedikit 1 jam berturut-turut dalam satu minggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi (BPS, 2017) data bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam satuan jiwa.

### 5. Kesejahteraan Masyarakat (IPM<sub>t</sub>)

Proxy yang digunakan adalah IPM yaitu ukuran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, yang dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak, data bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam satuan nominal.

dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

#### 4.4. Data dan pengukuran

##### 4.4.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel (gabungan antara *time series* dan *cross section*), data panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan data *time series* atau *cross section* Widarjono (2007) yakni, mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar, dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted variable*), menurut Wibisono (2005) keunggulan data panel; mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan variabel spesifik individu, data panel merupakan observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*) mampu mengontrol heterogenitas ini membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, variatif, sehingga multikolinieritas antar data semakin berkurang dan derajat bebas lebih tinggi sehingga diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien, dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Menurut Wooldridge dalam Ariefianto (2012) data ini memiliki keunggulan karena bersifat *robust* terhadap beberapa tipe pelanggaran asumsi *Gauss Markov* yakni heterokedastisitas dan normalitas yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Datanya meliputi pengukuran pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, investasi swasta, tenaga kerja terserap dan kesejahteraan masyarakat. Sumber data adalah data yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan secara resmi oleh badan/lembaga yang berkompeten, antara lain bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik pusat maupun provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Karo. Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, BKPM dan instansi lain yang terkait. Selain itu data juga diolah dalam bentuk analisis kuadran yang memetakan fenomena dalam sebuah gambar yang menggambarkan tentang pola dan struktur dari suatu fenomena terhadap fenomena lain, dalam penelitian ini melalui pemetaan terhadap variabel derajat desentralisasi fiskal dengan kesejahteraan masyarakat (IPM), Investasi Swasta dengan Kesejahteraan Masyarakat (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat (IPM), Tenaga Kerja Terserap dengan Kesejahteraan Masyarakat (IPM), dengan pemetaan akan didapatkan potret yang menggambarkan hubungan kedua variabel tersebut berdasarkan data yang sudah dikumpulkan peneliti. yang digambarkan dalam sebuah diagram Kartesius, yang dibagi ke dalam empat kuadran yaitu :

- a. Kuadran I menggambarkan fenomena A tinggi dan fenomena B tinggi.
- b. Kuadran II menggambarkan fenomena A tinggi dan fenomena B rendah
- c. Kuadran III menggambarkan fenomena A rendah dan B tinggi
- d. Kuadran IV menggambarkan fenomena A rendah dan fenomena B rendah

Olah data dalam pemetaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menentukan titik yang mempertemukan rata-rata derajat desentralisasi fiskal masing-masing kabupaten/kota dengan rata-rata IPM masing-masing kabupaten/kota, kemudian dipetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota berada pada kuadran yang sesuai.
- 2) Menentukan titik yang mempertemukan rata-rata investasi swasta masing-masing kabupaten/kota dengan rata-rata IPM masing-masing kabupaten/kota, kemudian dipetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota berada pada kuadran yang sesuai.
- 3) Menentukan titik yang mempertemukan rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota dengan rata-rata IPM masing-masing kabupaten/kota, dibuat sebagai salib sumbu X (pertumbuhan ekonomi) dan Y (IPM) kemudian dipetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota berada pada kuadran yang sesuai.

#### 4.4.2. Obyek penelitian

Obyek dalam penelitian ini meliputi 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota yakni; (1) Kabupaten Tanah Laut, (2) Kotabaru, (3) Banjar, (4) Barito Kuala, (5) Tapin, (6) Hulu Sungai Selatan, (7) Hulu Sungai Tengah, (8) Hulu Sungai Utara, (9) Tanjung, (10) Balangan, (11) Tanah Bumbu, dan 2 Kota yakni; (1) Kota Banjarmasin dan (2) Kota Banjarbaru. Berdasarkan ruang lingkup dan lokasi maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian data panel karena menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*, dengan jumlah observasi sebanyak 156 pengamatan.

#### 4.5. Tahapan estimasi model

Sebelum memasuki tahapan estimasi maka pada model harus dilakukan uji identifikasi seperti yang dikemukakan oleh Gujarati (2003) bahwa menggunakan metode TSLS lebih tepat untuk analisis dengan model simultan, karena semua variabel diperhitungkan sebagai suatu sistem secara menyeluruh dengan syarat-syarat identifikasi yang harus terpenuhi. Pemilihan model persamaan simultan dilakukan karena, merupakan suatu himpunan persamaan di mana variabel dependen yang terdapat dalam satu atau lebih persamaan juga dapat menjadi variabel independen dalam persamaan lain Gujarati (2003), uji identifikasi dilakukan sebelum memasuki tahap analisis simultan, uji ini adalah metode yang secara cepat mampu menentukan persamaan simultan bisa diestimasi atau tidak Widarjono (2007). Ada 2 metode yang dapat digunakan yaitu *order condition* dan *rank condition*, kedua menghasilkan kesimpulan akhir yang sama, dalam penelitian ini akan dilakukan metode identifikasi dengan *order condition*. Terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan yakni tidak teridentifikasi (*Unidentified*), teridentifikasi (*Just Identified*), terlalu teridentifikasi (*Over Identified*) Nachrowi dan Usman (2002).

Pada suatu model dengan M persamaan simultan, salah satu persamaan dikatakan sebagai:

1. *Unidentified* jika variabel *predetermine* tidak muncul pada persamaan tersebut ( $K-k$ ) kurang dari ( $<$ ) jumlah variabel endogen ( $m$ ) yang terdapat pada persamaan tersebut dikurangi 1, atau  $K-k < m-1$ .
2. *Just identified* atau *exactly identified* jika variabel *predetermine* tidak muncul pada persamaan tersebut ( $K-k$ ) persis ( $=$ ) sebanyak jumlah variabel *endogen* ( $m$ ) yang terdapat pada persamaan tersebut dikurangi 1, atau  $K-k = m-1$ .

3. *Overidentified* jika variabel predetermine tidak muncul pada persamaan tersebut ( $K-k$  lebih dari  $(>)$  jumlah variabel *endogen* ( $m$ ) yang terdapat pada persamaan tersebut dikurangi 1, atau  $K-k > m-1$ .

Dimana:

$m$  = jumlah variabel *endogen* dalam persamaan yang diberikan.

$K$  = jumlah variabel (*predetermined*) dalam model, termasuk intercept.

$k$  = jumlah variabel yang sudah ditetapkan dalam persamaan yang diberikan.

Berdasarkan ketentuan aturan identifikasi tersebut dilakukan identifikasi atas persamaan 4.1, 4.2, dan 4.3 diatas, berikut tabel identifikasinya:

Tabel 4.1  
Identifikasi Persamaan Simultan

Persamaan	K	k	m	identifikasi
4.1	9	2	1	<i>overidentified</i>
4.2	9	2	1	<i>overidentified</i>
4.3	3	0	1	<i>overidentified</i>

Karena hasil dari persamaan teridentifikasi *over identified* maka dapat digunakan persamaan simultan dengan metode kuadrat terkecil dua tahap atau TSLS (*Two Stage Least Square*), pengolahan datanya dilakukan dengan program Eviews versi 8.

Tahapan estimasi dalam penelitian ini 2 tahap, pertama meregresikan variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap tenaga kerja terserap, output dari regresi tahap pertama akan menjadi variabel bebas pada regresi tahap kedua yakni pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena pengaruh variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta tidak dapat langsung berdampak pada periode yang sama, oleh karena itu peneliti menggunakan *lag* dengan simulasi *time lag* seperti halnya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap memerlukan waktu, begitu juga pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap memerlukan waktu. Penggunaan *lag* dilakukan peneliti karena didukung oleh pernyataan dari Gujarati (2013) yang menyatakan bahwa dalam perekonomian terdapat variabel endogen membutuhkan jarak waktu untuk dapat merespon variabel eksogen, waktu yang dimaksud dinamakan *time lag*.

Tahapan estimasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Regresi Tahap Pertama

Adalah melakukan regresi pada persamaan (4.1) dan (4.2) dengan menggunakan metode OLS, dengan tujuan menghilangkan korelasi antara variabel terikat dengan *error term*, pada tahap ini akan dihasilkan nilai *predicted* pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang akan digunakan pada regresi tahap kedua.

- b. Simulasi *Time Lag*

Simulasi *time lag* digunakan dari suatu variabel penjelas apabila kita mengharapkan bahwa suatu variabel X berpengaruh terhadap Y setelah suatu periode waktu tertentu Sarwoko (2005), dalam penelitian ini desentralisasi fiskal dan investasi swasta dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi dan tenaga kerja terserap pada jarak waktu tertentu, jarak waktu (*lag*) tertentu variabel desentralisasi fiskal dan investasi swasta dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap.

Proses dalam simulasi *time lag* dilakukan pada persamaan 4.1 dan 4.2, secara berurutan dengan melakukan regresi DDF dan PI terhadap GRO dan TKT, prosedur secara berurutan tersebut akan terhenti ketika koefisien regresi dari variabel *lag* menjadi tidak signifikan secara statistik dan atau paling tidak satu dari koefisien variabel tersebut berubah tandanya dari positif ke negatif atau sebaliknya, dari simulasi *time lag* dapat diketahui berapa lama periode waktu yang dibutuhkan oleh variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap.

c. Regresi Tahap Kedua

Adalah melakukan regresi OLS pada persamaan (4.3) dengan menggantikan variabel pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dengan nilai *predicted* yang dihasilkan dari regresi tahap pertama.

Regresi data panel memiliki tiga pendekatan model estimasi yaitu:

1. Model *Pooled Least Square* (PLS)

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (4.4)$$

Menggabungkan data kemudian mengestimasi regresi tanpa memperdulikan sifat dari *time series* dan *cross section*.

2. Model *Fixed Effects* (FEM)

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (4.5)$$

Menggabungkan data, tetapi dengan memberi setiap unit *cross section* sebuah variabel (intersep) dummy.

3. Model *Random Effect* (REM)

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (4.6)$$

Tidak seperti FEM, dimana nilai sebuah intersep adalah sebuah nilai acak dari populasi yang lebih besar.

Teknik yang digunakan dalam menentukan model antara PLS dan FEM menggunakan uji Chow, sedangkan Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM. Hipotesis uji Chow

$$H_0 = \text{PLS}$$

$$H_1 = \text{FEM}$$

Pengujian Chow dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan  $\alpha$ . Apabila probabilitas  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan model FEM yang lebih tepat digunakan.

Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM.

Hipotesis uji Hausman adalah:

$$H_0 = \text{REM}$$

$$H_1 = \text{FEM}$$

Pengujian Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas chi-square dengan  $\alpha$ . Apabila probabilitas  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan model FEM yang lebih tepat digunakan.

#### 4.6. Prosedur ekonometrik

Prosedur ekonometrik yang dilakukan dala penelitian ini meliputi ;

a. Koefisien regresi secara bersama-sama: Uji F-Statistik

Uji F berfungsi untuk menentukan signifikan atau tidak signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$H_1$ : paling tidak salah satu  $\beta$  tidak sama dengan 0

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *p-value* dari hasil regresi dengan nilai tingkat kepercayaan ( $\alpha$ ) tertentu. Jika suatu variabel independen memiliki nilai *p-value*  $< \alpha$  tertentu maka  $H_0$  ditolak berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai *p-value*  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003).

b. Koefisien regresi secara parsial: Uji t-statistik

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien variabel bebas secara parsial. Fungsi uji t adalah untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0: \beta_i = 0$ ;  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ , artinya ada hubungan secara individu antara kedua variabel (variabel bebas dan terikat).

$H_1: \beta_i \neq 0$ , artinya tidak ada hubungan secara individu antara kedua variabel (variabel bebas dan terikat) (Gujarati, 2003).

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Gujarati (2003), koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk menentukan apakah variabel independennya dapat menerangkan variabel dependennya dengan baik. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1. Suatu model apabila  $R^2$  mencapai angka 1 maka variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dengan sempurna. Sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  mencapai angka 0 berarti variabel independen tidak dapat menjelaskan dengan sempurna variabel dependennya.

## BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Deskripsi Variabel Penelitian

#### 5.1.1. Kesejahteraan Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia)

Ukuran kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subyektif sehingga ada banyak proxy yang bisa dipilih untuk menggambarkannya, dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita digambarkan dalam dari 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak. Pengamatan terhadap data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2016 diketahui bahwa Kota Banjarbaru dan Banjarmasin sebagai kota dengan IPM peringkat 1 dan 2 di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Kabupaten dengan tingkat IPM terendah adalah Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala (BPS, 2018).

Tabel 5.1  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2016

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	64,35	65,16	66,11	66,50	66,99	67,44
2	Kota Baru	64,27	64,87	65,41	65,76	66,61	67,10
3	Banjar	64,75	65,04	65,36	65,71	66,39	66,87
4	Barito Kuala	60,93	61,62	62,12	62,56	63,53	64,33
5	Tapin	65,41	65,92	66,48	66,99	67,67	68,05
6	Hulu Sungai Selatan	63,44	64,03	64,59	65,25	66,31	67,52
7	Hulu Sungai Tengah	63,90	64,34	64,63	65,37	66,56	67,07
8	Hulu Sungai Utara	59,24	60,12	60,77	61,32	62,49	63,38
9	Tabalong	66,60	67,36	68,08	68,36	69,35	70,07
10	Tanah Bumbu	65,59	66,13	66,51	66,94	67,58	68,28
11	Balangan	63,28	63,69	64,03	64,44	65,34	66,25
12	Kota Banjarmasin	72,01	73,45	74,59	74,94	75,41	75,94
13	Kota Banjar Baru	76,23	76,67	77,10	77,30	77,56	77,96

Sumber : BPS (2018b).

Rata-rata komponen pembentuk IPM di Kabupaten / kota di Banjarmasin adalah sebagai berikut rata-rata harapan hidup 67,65 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 12,22 tahun, rata-rata pendapatan perkapita Rp.10.372.000,- pertahun, dan rata-rata lama sekolah 7,80 tahun, rendahnya IPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersumber dari rendahnya 3 komponen pembentuk IPM dibandingkan rata-rata di Kabupaten/Kota meliputi; angka harapan hidup hanya 62,71 tahun, pendapatan

perkapita Rp. 8.688.700,- rata-rata lama sekolah 7,80 tahun. Sedangkan di Kabupaten Barito Kuala bersumber dari rendahnya angka harapan hidup 65,14 tahun, harapan lama sekolah 11,92 tahun, pendapatan perkapita Rp. 9.226.000,- dan rata-rata lama sekolah 7,80 tahun (BPS, 2018).

Jika dilihat dari sektor tenaga kerja di kedua kabupaten ini diketahui bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar masyarakat sekitar 45% bekerja disektor jasa, 30% di sektor pertanian dan 25% disektor industri, besarnya peranan sektor jasa di Kabupaten ini karena sejak dahulu sebagian besar pedagang di Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari daerah ini, selain itu juga bekerja sebagai tukang jahit secara turun temurun dan belajar secara otodidak, sedangkan di Kabupaten Barito Kuala dari dahulu diketahui sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani yakni sebesar 55% penduduk bekerja di sektor pertanian, 32% disektor jasa dan hanya 12% di sektor industri, jika di lihat dari penggunaan lahan di daerah ini diketahui sebagai Kabupaten yang penggunaan lahannya terbesar untuk persawasaan yakni 112,747,68 Km<sup>2</sup> (BPS,2017), hal ini berarti bahwa produktivitas tenaga kerja rendah selain kecilnya peranan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

### 5.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2005-2016 secara umum menunjukkan kecenderungan mengalami pelambatan (penurunan), tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda antar masing-masing Kabupaten/Kota, ada Kabupaten/Kota dengan pelambatan ekonomi yang

Tabel 5.2

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2005-2016 (%)

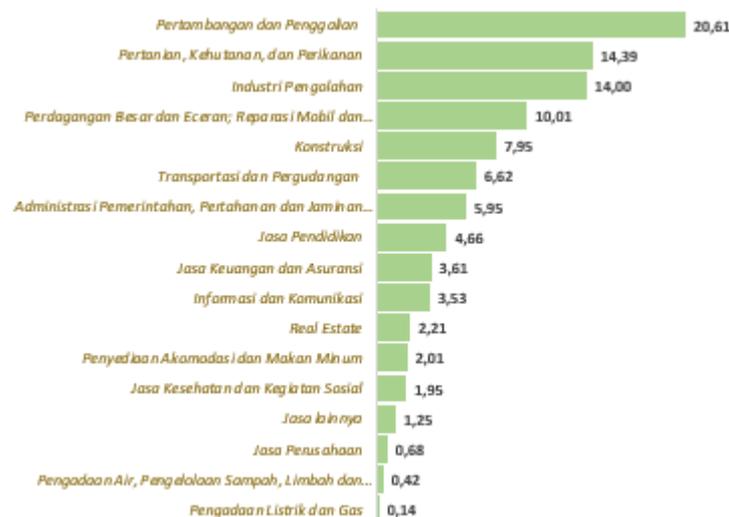
No	Kabupaten/Kota	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Tanah Laut	6,02	6,03	7,29	6,03	5,49	3,19	2,87	3,25	5,26
2	Kota Baru	5,23	6,60	6,34	6,53	5,22	4,66	3,32	4,25	5,41
3	Banjar	5,46	4,72	7,28	6,28	4,60	5,08	4,40	4,79	5,46
4	Barito Kuala	-3,32	3,85	4,24	4,88	4,12	4,51	5,26	5,14	1,89
5	Tapin	7,29	6,19	6,55	6,32	5,75	5,44	4,05	4,95	5,48
6	Hulu Sungai Selatan	3,51	3,46	5,40	5,33	5,68	5,79	6,05	8,08	5,30
7	Hulu Sungai Tengah	5,95	4,75	5,98	4,85	5,83	5,56	6,12	6,21	5,92
8	Hulu Sungai Utara	3,79	4,58	6,42	5,40	5,34	5,99	5,34	4,65	5,26
9	Tabalong	2,44	5,99	8,69	6,48	4,36	4,03	2,41	3,11	5,46
10	Tanah Bumbu	6,09	6,55	7,91	6,29	3,80	3,74	2,94	3,12	5,10
11	Balangan	4,83	6,02	8,84	6,69	8,04	5,90	2,41	2,62	5,39
12	Kota Banjarmasin	4,35	6,58	5,15	6,18	6,93	6,11	5,79	6,28	5,99
13	Kota Banjar Baru	5,11	5,85	5,99	6,54	6,59	6,68	6,91	6,94	6,14

Sumber : BPS (2008b, 2010b, 2012b, 2016b)

tinggi dan ada pula dengan pelambatan yang kecil, pelambatan ekonomi terbesar terjadi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan Tanah Bumbu. Kontribusi daerah Kabupaten/kota dalam pembentukan PDRB total Kabupaten/kota yang terbesar berasal dari Kota Banjarmasin (17,28%), Kotabaru (13,27%), Tanah Bumbu

(11,31%) dan Kabupaten Tabalong (10,43%), 2 Kabupaten/kota adalah penghasil batubara terbesar berdasarkan data tahun 2016 jumlah produksinya di Kabupaten Tanah Bumbu 19.775.630,16 ton, Kotabaru 2.340.949,23 ton, sedangkan Kabupaten Tabalong daerah perkebunan sebagai penghasil karet dan kelapa sawit.

Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten/Kota merupakan hal yang wajar mengingat masing-masing wilayah memiliki kondisi geografis yang khas sehingga memiliki keragaman dalam sumber daya daerahnya, selain itu juga pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan memberikan hasil akhir yang berbeda, sehingga secara spasial akan ada daerah yang mengalami pertumbuhan cepat dan ada pula yang lambat. Disisi lain pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kepekaan sektor utama pembentuk PDRB terhadap perubahan global, seperti halnya 3 kabupaten diatas yakni Kabupaten Balangan, Tabalong dan Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang sektor utama pembentuk PDRBnya adalah Sektor Pertanian dan Pertambangan dan Penggalian, sehingga adanya perubahan harga bahan tambang dan hasil perkebunan akan berdampak besar bagi percepatan atau pelambatan ekonomi di 3 kabupaten ini.



Sumber : BPS (2018a)

Gambar 5.1  
Distribusi PDRB (%) menurut sektor tahun 2017

Berdasarkan distribusi PDRB diketahui bahwa sektor terbesar dalam PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian 20,61%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,39%, dan Industri pengolahan 14,00%, Hal ini berarti sebagian besar sumber pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pertambangan dan penggalian yang sebagian besar belum diolah karena belum adanya industri pengolahan di sektor ini, ekspor komoditas ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga secara global, apalagi harga komoditas ini pernah booming pada tahun 2000an, dan batubara dikenal sebagai “emas baru”. Berdasarkan publikasi Indonesia Investment (2018) pada masa kejayaannya penyumbang terbesar dalam total penerimaan negara, hal ini di dorong oleh kelimpahan jumlah batubara, proses ekstraksinya yang relatif mudah dan murah serta persyaratan infrastruktur

yang lebih murah dibanding sumber energi lainnya, Indonesia memiliki cadangan batubara kualitas menengah dan rendah yang melimpah yang dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional (termasuk di dalamnya komponen upah tenaga kerja Indonesia yang rendah), besarnya permintaan untuk pasar dunia dari negara RRC dan India, industri batubara Indonesia terbagi hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku usaha skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan).

Situasi menguntungkan ini berubah sejak terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika harga-harga komoditas menurun begitu cepat yang ikut berimbas pada penurunan permintaan batubara yang menyebabkan penurunan tajam harga batubara dari awal 2011 hingga pertengahan 2016, penurunan harga ini selain dari berkurangnya permintaan dari RRC juga disebabkan oleh booming harga banyak perusahaan baru berdiri dan yang lama melakukan reinvestasi untuk menambah kapasitas produksi yang berakibat pada melimpahnya produksi, dan banyak yang harus menjual dengan harga yang rendah untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan membuat harga komoditas makin terpuruk. Hal ini yang juga mempengaruhi penurunan perekonomian Kalimantan Selatan 6 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan dan tahun 2016 mulai meningkat seiring dengan membaiknya harga komoditas terutama batubara di pasaran global.

### 5.1.3. Tenaga Kerja Terserap

Banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada suatu Kabupaten/Kota tercermin dalam jumlah tenaga kerja terserap, besarnya jumlah dari tenaga kerja terserap sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan utama penduduk di Kalimantan Selatan sebesar 36,05% bekerja di sektor pertanian, dan 25,17% bekerja di sektor perdagangan (BPS.2017).

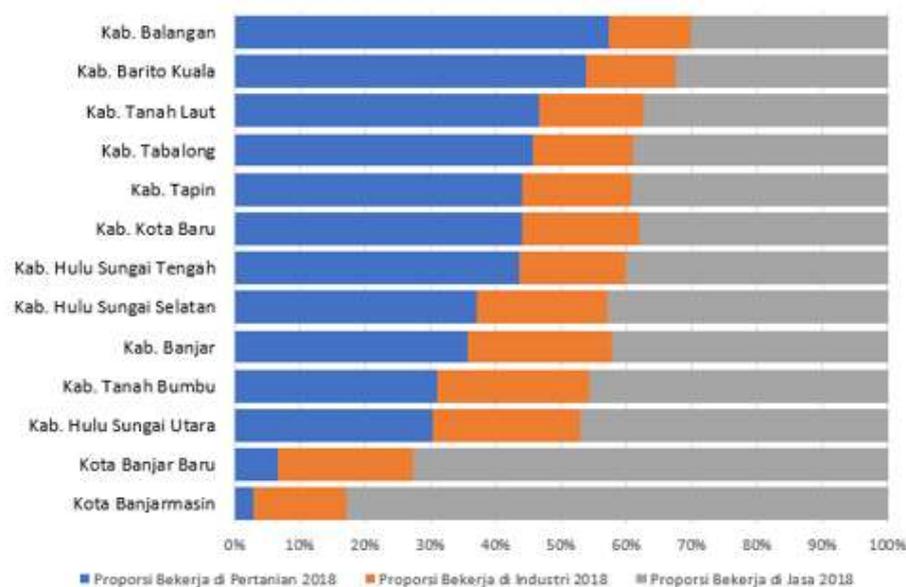
Tabel 5.3  
Jumlah Tenaga Kerja Terserap Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2016

No	Kabupaten/Kota	2005	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	121.685	153.936	154.060	147.407	160.304	164.595	168.886
2	Kota Baru	130.103	147.484	133.021	125.935	134.127	134.574	135.021
3	Banjar	158.409	260.815	280.051	282.722	309.693	326.502	343.311
4	Barito Kuala	147.029	144.398	157.259	148.240	149.138	149.373	149.607
5	Tapin	74.245	90.089	79.035	83.405	86.210	87.540	88.869
6	Hulu Sungai Selatan	113.787	110.779	102.037	103.555	103.682	102.560	101.437
7	Hulu Sungai Tengah	123.397	127.511	129.642	125.680	127.969	128.477	128.985
8	Hulu Sungai Utara	118.834	105.037	115.207	108.501	106.109	104.695	103.281
9	Tabalong	100.544	113.131	112.028	119.434	119.468	121.571	123.674
10	Tanah Bumbu	80.718	132.558	121.185	128.165	138.854	145.313	151.773
11	Balangan	61.149	58.481	65.653	61.564	60.766	60.723	60.681
12	Kota Banjarmasin	267.158	288.975	288.995	282.451	293.328	296.236	299.144
13	Kota Banjar Baru	53.473	91.735	83.154	94.037	100.890	106.159	111.427

Sumber : BPS (2017)

Jumlah tenaga kerja terserap di masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan kondisi yang beragam selama pengamatan 2005-2016, dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung fluktuatif, seperti di tahun 2016 Kabupaten/Kota yang angka penyerapan tenaga kerja tertinggi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya relatif sama, besarnya tenaga kerja terserap berhubungan dengan proporsi tenaga kerja dalam sektor ekonomi.

Proporsi tenaga kerja terserap berdasarkan sektor ekonomi diketahui untuk Kota Banjarmasin di sektor jasa dan Kabupaten Banjar sebagian besar pada sektor jasa dan pertanian, bukan di sektor industri, selain itu masalah ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan juga bersumber dari banyaknya pekerja yang berasal dari luar daerah yang sangat marak pada masa pemerintahan orde baru tahun 1990, dan juga pekerja asing.



Sumber : BPS (2019)

Gambar 5.2  
Proporsi Penduduk bekerja berdasarkan sektor di Kabupaten/Kota  
Kalimantan Selatan tahun 2018

#### 5.1.4. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan ukuran dari kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri Musgrave dan Musgrave dalam Sukanto (2011), berdasarkan pengamatan tahun 2005-2016 diketahui bahwa, kemampuan semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan performance yang baik, hal ini terlihat dari kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan semakin besar, dan meningkat, meskipun dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, penurunan hampir terjadi di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, penurunan yang tinggi terjadi di Kabupaten Tanah Laut dan Tabalong.

Tabel 5.4  
Derajat Desentralisasi Fiskal  
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2005-2016 (%)

No	Daerah	Tahun							
		2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Tanah Laut	49,10	61,49	83,24	84,83	92,44	62,00	52,81	37,90
2	Kab. Kota Baru	55,63	38,12	51,31	62,62	54,34	53,42	53,95	45,15
3	Kab. Banjar	27,73	42,90	56,42	64,62	51,55	43,84	49,34	44,26
4	Kab. Barito Kuala	20,64	33,80	37,95	44,34	38,98	37,98	36,83	29,76
5	Kab. Tapin	33,47	46,73	55,51	56,99	48,59	53,88	56,93	39,57
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	25,09	32,81	44,43	48,40	43,86	43,22	39,59	49,13
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	25,83	31,89	43,51	49,53	38,56	35,33	40,18	39,52
8	Kab. Hulu Sungai Utara	40,12	39,92	43,71	52,16	49,28	46,69	45,47	33,26
9	Kab. Tabalong	54,69	53,22	65,25	36,86	74,95	57,21	63,66	56,67
10	Kab. Tanah Bumbu	47,70	60,34	89,24	85,75	54,07	54,38	60,64	63,64
11	Kab. Balangan	66,71	61,03	71,80	75,17	62,30	49,37	67,37	68,54
12	Kota Banjarmasin	31,53	42,04	45,31	63,03	48,42	41,86	49,37	40,08
13	Kota Banjar Baru	27,79	43,57	58,14	63,65	55,88	49,70	43,44	35,48

Sumber : BPS (2006, 2011a, 2012a, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2017a)

Komponen pembentuk Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) serta Lain-lain PAD yang sah (LLPAD), karena secara geografis kondisinya berbeda maka dari 13 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan, ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan ada pula yang sedikit, dan berdampak pada besarnya komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) seperti pada Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Tapin, Tabalong, dan Balangan, sehingga derajat desentralisasi fiskal di daerah ini relatif besar.

#### 5.1.5. Investasi Swasta

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan merupakan nilai penanaman modal yang terealisasi, dimana bentuk dari investasi swasta ini berupa modal kerja dan investasi diberbagai sektor, Secara umum kondisi Investasi Swasta di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel 5.5, terjadi sebaran dan volume investasi swasta yang tidak merata karena tidak semua daerah di provinsi ini menarik sebagai tujuan investasi, investasi swasta terbesar di Kota Banjarmasin, Kotabaru, dan Tanah Laut.

Tabel 5.5 Realisasi Investasi Swasta  
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2010 dan 2016 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Investasi Swasta		Rata-Rata Pertumbuhan
	2010	2016	
Tanah Laut	1.385.705,28	1.788.706,99	4,35
Kota Baru	1.967.990,71	2.636.854,84	5,03
Banjar	2.367.474,80	3.003.964,60	4,06
Barito Kuala	1.111.299,09	1.509.672,32	5,24
Tapin	816.849,76	1.059.635,77	4,53

Hulu Sungai Selatan	871.833,57	1.161.948,59	4,91
Hulu Sungai Tengah	922.392,05	1.200.576,96	4,49
Hulu Sungai Utara	568.877,37	1.031.050,79	11,07
Tabalong	1.174.048,63	1.541.092,29	4,64
Tanah Bumbu	1.361.986,22	1.867.078,80	5,40
Balangan	1.065.058,83	1.410.236,08	4,79
Banjarmasin	3.537.924,69	5.432.524,01	7,41
Banjarbaru	1.763.464,40	2.261.784,63	4,24

Sumber : Bank Indonesia (2017)

## 5.2. Analisis Persamaan Simultan TSLS (*Two Stage Least Square*)

Metode TSLS dapat digunakan setelah model memenuhi syarat-syarat identifikasi, dalam penelitian ini telah dilakukan proses identifikasi, hasilnya teridentifikasi *Over identified* maka dapat digunakan persamaan simultan dengan metode kuadrat terkecil dua tahap atau TSLS (*Two Stage Least Square*) dalam penelitian ini.

### 5.2.1. Hasil Regresi Tahap Pertama

Simulasi regresi pada tahap pertama dilakukan mulai dari tanpa *lag*, sampai dengan menggunakan *lag* 4 dan berdasarkan aturan pada simulasi *lag* disebutkan bahwa prosedur simulasi akan berhenti ketika koefisien regresi dari variabel *lag* menjadi tidak signifikan secara statistik dan atau paling tidak satu dari hasil dari koefisien variabel tersebut berubah tandanya, pada simulasi tanpa lag sampai dengan 4 diketahui bahwa hasil estimasi DDF dan PI terhadap pertumbuhan ekonomi pada metode PLS, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6  
Hasil Estimasi Variabel DDF dan PI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
Metode PLS, FEM dan REM

Variabel	PLS	FEM	REM
C	5,83 (0,55)	6,00 (0,97)	5,85 (0,53)
DDF <sub>(t)</sub>	0,01 (0,01)	0,01 (0,02)	0,01 (0,01)
DDF <sub>(t-1)</sub>	0,00 (0,02)	-0,01 (0,02)	0,03 (0,02)
DDF <sub>(t-2)</sub>	0,01 (0,02)	0,01 (0,02)	0,00 (0,02)
DDF <sub>(t-3)</sub>	-0,01 (0,02)	-0,01 (0,02)	-0,01 (0,01)
DDF <sub>(t-4)</sub>	-0,02 (0,01)	-0,01 (0,01)	-0,02** (0,01)
PI <sub>(t)</sub>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
PI <sub>(t-1)</sub>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
PI <sub>(t-2)</sub>	0,00	0,00	0,00

	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PI <sub>(t-3)</sub>	0,00	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PI <sub>(t-4)</sub>	0,00	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
R <sup>2</sup>	0,23	0,42	0,22
Prob F (Stat)	0,02**	0,00*	0,02**

Keterangan: \*Signifikan pada  $\alpha = 1\%$   
 \*\*Signifikan pada  $\alpha = 5\%$   
 () standard error

Hasil dengan metode PLS diketahui dari tanpa lag hingga lag 4 tidak ada variabel yang signifikan. Estimasi DDF dan PI terhadap pertumbuhan ekonomi dilanjutkan dengan metode FEM yang diketahui hasilnya, dimulai tanpa lag hingga lag 4 tidak ada satupun variabel yang signifikan, Estimasi berikutnya dengan metode REM, pada metode ini ditemukan variabel DDF signifikan pada lag 4 sedang variabel PI tidak signifikan dan sesuai dengan aturan simulasi lag yang memenuhi kerreteria pada lag 4 maka estimasi dihentikan untuk kemudian dilakukan sebagai dasar untuk melakukan analisis pada tahap selanjutnya.

Regresi tahap pertama dimulai dengan pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, pada Tabel 5.7. berikut:

Tabel 5.7 Hasil Uji Chow dan Hausman

Effect Test	Statistik	Prob
Cross-section F	2,02	0,03
Cross-section random	20,53	0,06

Berdasarkan hasil pemilihan metode panel regresi melalui uji Chow untuk memilih metode PLS atau FEM, diketahui dari nilai  $F = 2,02$  dan  $Prob. = 0,03$  yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  berarti terima hipotesis metode FEM lebih baik daripada PLS, dan Uji Hausman untuk memilih metode FEM atau REM diketahui dari nilai Chi Square = 20,53 dengan  $Prob. = 0,06$  yang berarti lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  berarti metode REM lebih baik daripada FEM, berdasarkan hasil uji tersebut diatas maka metode terbaik adalah REM, karena model terbaik REM maka tidak perlu menguji permasalahan asumsi Klasik karena sudah menggunakan metode GLS.

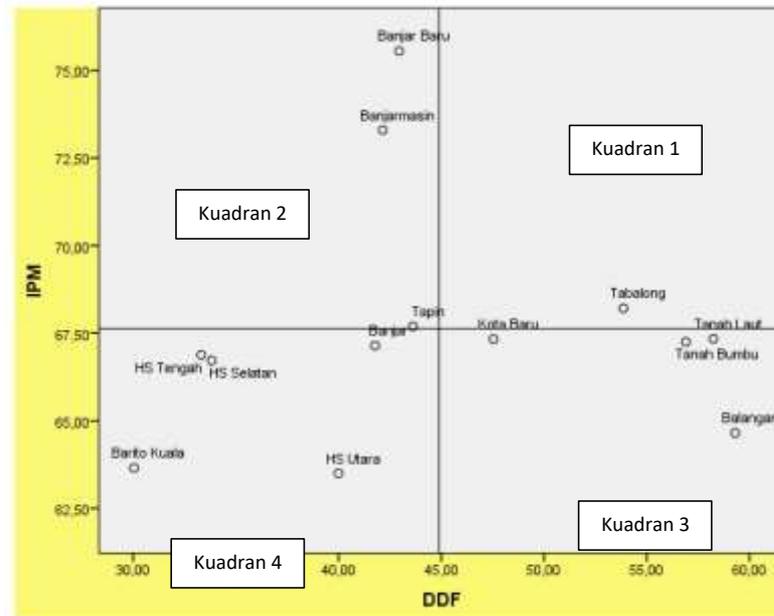
Pada metode REM lihat Tabel 5.6 secara bersama-sama variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diketahui dari  $F \text{ stat.} = 0,02$ , sedangkan secara partial hanya variabel derajat desentralisasi fiskal yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah hubungan negatif. Hal ini berarti daerah dengan derajat desentralisasi fiskal besar mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, dibandingkan daerah dengan derajat desentralisasi fiskal lebih rendah. Variabel derajat desentralisasi fiskal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi setelah 4 tahun kemudian karena pengaruhnya baru signifikan di lag 4 pada  $\alpha = 5\%$  nilai prob.  $DDF_{(t-4)}$  sebesar 0,04.

Pengaruh negatif ini berhubungan erat dengan unsur pembentuk angka derajat desentralisasi fiskal yang dalam penelitian ini menggunakan persentase total pendapatan daerah diluar dana perimbangan yakni PAD, BHPBP, dan LLPAD

terhadap Total pengeluaran daerah, berdasarkan besaran pembentuk total pendapatan daerah diketahui bahwa hampir semua kabupaten porsi terbesar pembentuk pendapatan daerahnya adalah bersumber dari bagi hasil bukan pajak (SDA) lihat lampiran 8, angka derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2016 antara 29,76% hingga 68,54% lihat Tabel 5.4 yang berarti bahwa pengeluaran daerah juga banyak ditutupi oleh dana perimbangan. Hubungan negatif ini juga disumbang oleh alokasi belanja daerah yang belum efisien yang terlihat pada minimnya belanja modal dalam belanja langsung tahun 2016 antara 12,50% hingga 71,54% lihat Lampiran 4, selain itu juga besarnya komponen belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung tahun 2016 antara 62,42% hingga 96,82% lihat Lampiran 5.

Temuan dalam penelitian ini juga diperkuat analisis *kuadran* untuk memetakan daerah berdasarkan kondisi yang relevan dengan hal yang ingin dibuktikan dari hipotesis seperti analisis kuadran untuk memetakan hubungan antara derajat desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Gambar 5.3. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah yang berada pada Kuadran 1 adalah Kabupaten Tabalong yakni kabupaten dengan Derajat Desentralisasi Fiskal dan IPM juga tinggi, kabupaten/kota di kuadran 2 adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru yaitu daerah dengan derajat desentralisasi fiskal rendah dan IPM tinggi, daerah yang berada di kuadran 3 adalah Kabupaten Balangan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut adalah daerah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi dan IPM rendah, daerah yang berada di kuadran 4 adalah Kabupaten Banjar, Batito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara adalah daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal dan IPM juga rendah. Kabupaten Tapin berada diantara kuadran 2 dan 4 yakni daerah dengan derajat desentralisasi fiskal rendah dan IPM sedikit diatas rata-rata.

Ada fenomena yang menarik untuk dianalisis lebih jauh terutama bagi Kabupaten/Kota yang berada pada Kuadran 2 dan kuadran 3, daerah yang berada di kuadran 2 Kota Banjarmasin adalah ibukota provinsi, Kota Banjarbaru adalah pusat pemerintahan maka pada 2 daerah ini tersedia fasilitas publik yang relatif lebih baik dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, selain itu kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan program nasional di bidang kesehatan melalui program Indonesia Sehat, di bidang pendidikan melalui program Indonesia Pintar, bidang Ekonomi melalui program yang lebih variatif yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan baik bank maupun non bank.



Gambar 5.3  
Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia  
Tahun 2005-2016

Daerah yang berada pada kuadran 3 memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah lain, khususnya di bidang Pertambangan dan Perkebunan tergambar dalam APBD komponen bagi hasil bukan pajak yang besar, selain juga memiliki sumber pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yang cukup tinggi, hasil pemetaan ini menggambarkan bahwa pentingnya daerah menggali potensi penerimaan daerah bukan hanya tergantung kepada sumber daya alam, meskipun suatu daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang tinggi namun jika tidak dialokasikan secara baik maka dampaknya terhadap kesejahteraan akan rendah, peranan alokasi anggaran yang efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan dalam penelitian ini meskipun signifikan namun arah hubungannya tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Keynes (1936) dalam Sukirno (2012) tentang teori Identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian, Wagner dalam Mangkoesoebroto (2013) apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, hubungan antara keduanya secara timbal balik adalah positif. Teori Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2013) pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan GNP, dan pendapat Rossen (2002), bahwa kesejahteraan ekonomi memfokuskan pada kondisi-kondisi dimana alokasi sumber-sumber ekonomi mencapai efisiensi Pareto. Hal ini terjadi karena pada umumnya daerah dengan tingkat derajat desentralisasi fiskal yang tinggi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan bagi daerah sebagai sumber pendapatan bukan pajak, akan meningkatkan derajat desentralisasi fiskal dalam pendekatan penelitian ini, tetapi pengaruhnya dalam pertumbuhan

ekonomi justru negatif ini berarti bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal yang terjadi tidak diiringi dengan kemampuan mengalokasikan anggaran, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi malah negatif.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi empiris yang dilakukan peneliti sebelumnya pada beberapa negara seperti oleh Davoodi dan Zou (1998), Fauziah (2007), Rodriguez-Pose and Kroijer (2009), Zhang dan Zou (2001), Rodden (2002), Thießen (2003), dan Rodriguez-Pose dan Bwire (2004), Baskaran dan Felds (2009). Pose and Ezcurra (2010) dan Jumadi (2013) tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi signifikan dan arahnya negatif, hal ini mendukung temuan peneliti yang berarti apa yang jadi temuan dalam penelitian ini juga ditemukan didaerah lain.

Dengan metode REM diketahui secara partial variabel investasi swasta berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari hasil simulasi tanpa lag hingga lag ke 4, namun menunjukkan arah yang positif, yang berarti bahwa ketika terjadi peningkatan investasi swasta juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan jika terjadi penurunan investasi swasta juga diikuti penurunan ekonomi namun tidak signifikan, kondisi ini relevan dengan keadaan investasi daerah saat ini yang berdasarkan data 2005 hingga 2016 dalam Gambar 1.5 diketahui sebaran investasi sangat tidak merata dan sebagian besar berada di ibukota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, Banjar dan Kota Banjarbaru, sementara kabupaten lainnya relatif kecil dan pertumbuhannya juga menunjukkan pola yang sama, sehingga cukup relevan jika investasi swasta belum mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota karena terpusat pada satu tempat saja tidak tersebar. Investasi swasta yang dilakukan di daerah perkotaan seperti Kota Banjarmasin dan Banjarbaru ada disektor jasa karena sebagai kota perdagangan dan kota pemerintahan menunjukkan bahwa sifat investasi lebih kepada bagian hilir saja karena barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang jadi sehingga dampaknya tidak besar terhadap perekonomian, kemudian di Kabupaten Kotabaru dan Banjar investasi swasta banyak ditanamkan di sektor primer yang belum diolah, sehingga dampaknya terhadap perekonomian juga kecil.

Temuan ini tidak sejalan dengan teori tentang Investasi swasta pada tahap menengah menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2013) bahwa investasi swasta sudah semakin besar yang diikuti dengan kegagalan pasar sehingga diperlukan peranan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Menurut Mankiw (2007) Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi, Harrod dan Domar dalam Arsyad (2010) mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*), Pertumbuhan ekonomi menurut mazhab klasik berkisar pada proses akumulasi pembentukan modal secara kumulatif (modal fisik maupun dana). Investasi untuk menambah alat-alat produksi, menambah modal fisik dan dana. Melalui proses akumulasi, maka kemampuan memproduksi meningkat Kaldor dalam Djojohadikusumo (1994).

Studi empiris yang dilakukan Hendarmin (2012) pengaruh investasi swasta di 12 Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki dampak negatif yang signifikan dan Faroek (2010) semakin berkembang industri berarti investasi swasta semakin besar namun di Provinsi Kalimantan Timur justru berdampak mengurangi

pertumbuhan ekonomi karena industrinya termasuk dalam jenis investasi yang menghasilkan sektor primer yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang rendah, kebanyakan investor di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar luar daerah dalam sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sehingga pendapatan daerah hanya mendapatkan imbalan berupa royalty saja untuk usaha tambang, dan untuk usaha perkebunan sawit yang dihasilkan belum diolah sehingga dampak investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.

Regresi pada tahap pertama dilanjutkan untuk mendapatkan hasil estimasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta terhadap Tenaga Kerja Terserap, dan sama dengan langkah sebelumnya juga dilakukan simulasi lag yang hasil estimasi dengan metode PLS, FEM, dan REM dimulai dari tanpa lag hingga lag ke 4 tidak ada variabel DDF dan PI yang signifikan lihat Tabel 5.8. Estimasi dilanjutkan dengan metode FEM diketahui variabel DDF signifikan pada lag 4 sedangkan variabel PI tidak ada yang signifikan sampai pada lag ke ke 4 dan pada metode REM diketahui tidak ada satu variabelpun yang signifikan dan sesuai aturan simulasi karena sudah ditemukan ada variabel yang signifikan pada lag 4 maka simulasi lag dihentikan pada lag 4, rekapitulasinya dapat dilihat pada Tabel 5.9 metode PLS, FEM dan REM.

Tabel 5.8  
Hasil Estimasi Variabel DDF dan PI terhadap Tenaga Kerja Terserap  
Metode PLS, FEM, REM

Variabel	PLS	FEM	REM
C	127856,8 (25331,01)	114083,8 (11205,43)	110155,7 (12018,29)
DDF <sub>(t)</sub>	-362,7 (651,73)	51,56 (188,40)	-190,42 (179,41)
DDF <sub>(t-1)</sub>	101,54 (765,72)	44,66 (187,39)	78,25 (186,68)
DDF <sub>(t-2)</sub>	89,69 (734,89)	44,07 (174,21)	48,94 (174,00)
DDF <sub>(t-3)</sub>	-69,57 (704,71)	137,88 (174,73)	-4,68 (171,89)
DDF <sub>(t-4)</sub>	23,18 (552,10)	395,78** (143,65)	365,61 (140,81)
PI <sub>(t)</sub>	9,91 (9,53)	1,25 (2,84)	6,78 (2,51)
PI <sub>(t-1)</sub>	6,65 (11,40)	2,06 (2,80)	4,95 (2,73)
PI <sub>(t-2)</sub>	2,28 (11,29)	-1,99 (2,81)	1,27 (2,72)
PI <sub>(t-3)</sub>	1,47 (11,52)	0,61 (2,76)	1,58 (2,74)
PI <sub>(t-4)</sub>	13,16 (9,04)	1,78 (2,91)	9,16 (2,46)

R <sup>2</sup>	0,46	0,97	0,29
Prob F (Stat)	0,00*	0,00*	0,00*

Keterangan: \*Signifikan pada  $\alpha = 1\%$   
 \*\*Signifikan pada  $\alpha = 5\%$   
 () standard error

Hasil simulasi lag ditentukan pada lag 4 untuk kemudian dilakukan pengujian untuk menentukan model terbaik menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan Uji Chow diperoleh nilai F sebesar 118,72 dengan Prob. sebesar 0,00 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif yang diterima yaitu model FEM lebih baik daripada model PLS. Uji Hausman memberikan hasil *Chi-Square* sebesar 89,36 dengan Prob sebesar 0,00, berarti hipotesis alternatif yang diterima yaitu FEM lebih baik daripada model REM, kedua hasil uji memilih model terbaik pada persamaan 5.2 adalah FEM, untuk selanjutnya hasil estimasi yang digunakan model FEM.

Tabel 5.9

## Hasil Uji Chow dan Hausman

Effect Test	Statistik	Prob
Cross-section F	118,73	0,00
Cross-section random	89,36	0,00

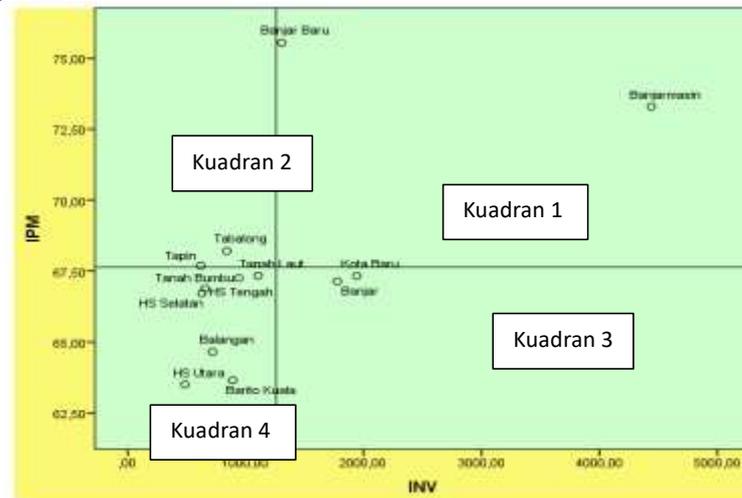
Uji asumsi klasik pada persamaan 5.2 metode yang digunakan adalah FEM maka dilakukan uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis, berupa uji Normalitas, diketahui P-value Jarque-bera (JB) sebesar  $0,00 < \alpha$  (0,05) terima  $H_0$  yang berarti bahwa data terdistribusi normal, uji multikoleniaritas hasilnya diketahui sebesar  $0,27 < 0,80$  sehingga terima  $H_0$  yang berarti data tidak terjadi multikoleniaritas. Hasil uji heteroskedastisitas diketahui P- value dari DDF (0,09) dan PI (0,17)  $> \alpha$  (0,05) berarti terima  $H_0$  dan tolak  $H_1$  yang berarti bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskidastisitas.

Pengujian hipotesis pada persamaan 5.2 berdasarkan Tabel 5.12 diketahui bahwa hipotesis kedua yang menyatakan derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap secara bersama-sama dapat diterima dengan F sebesar  $0,00 < \alpha = 0,05$ , sedangkan secara partial berdasarkan hasil simulasi lag diketahui bahwa hanya variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap tenaga kerja terserap pada lag 4 dapat diterima dengan t sebesar  $0,01 < \alpha = 0,05$ , sedangkan hipotesis investasi swasta terhadap tenaga kerja terserap tidak dapat diterima (ditolak) karena berdasarkan hasil simulasi lag sampai dengan lag 4 ditemukan hasil uji  $t > \alpha = 0,05$ .

Variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap tenaga kerja terserap secara signifikan dengan arah hubungan positif hal ini berarti bahwa ketika derajat desentralisasi fiskal meningkat akan diikuti dengan peningkatan tenaga kerja terserap. Sedangkan variabel investasi swasta terhadap tenaga kerja terserap berpengaruh secara tidak signifikan dengan arah positif yang bermakna bahwa jika terjadi peningkatan investasi swasta maka akan diikuti dengan peningkatan tenaga kerja terserap dan jika terjadi penurunan investasi swasta akan diikuti penurunan tenaga kerja terserap.

Temuan ini diperkuat dengan pemetaan terhadap pola dan struktur dari Investasi Swasta dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM) seperti terlihat pada lihat Gambar 5.3. Daerah yang berada di kuadran 1 adalah Kota Banjarmasin dan

Banjarbaru yakni memiliki Investasi Swasta dan IPM juga tinggi, kuadran 2 Kabupaten Tabalong dan Tapin memiliki investasi swasta rendah dan IPM tinggi, kuadran 3 Kabupaten Kota Baru dan Banjar memiliki investasi swasta tinggi dan IPM rendah, Kuadran 4 Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu dan Balangan adalah daerah dengan Investasi Swasta dan IPM rendah.



Gambar 5.4

Pemetaan Investasi Swasta dan Kesejahteraan Masyarakat  
Tahun 2005-2016

Daerah yang berada pada kuadran 2 (Investasi Swasta rendah, IPM tinggi) Kabupaten Tabalong, umumnya adalah daerah yang pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan IPM di daerahnya dengan mengawal secara maksimal program nasional dibidang kesehatan dan pendidikan, begitu juga dibidang ekonomi Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPR untuk mengakomodir UMKM supaya memiliki akses terhadap perbankan melalui program Gerbang Emas dan berbagai pelatihan serta melaksanakan berbagai event untuk membangkitkan perekonomian rakyat, sedangkan Kabupaten Tapin karena kemudahan akses ke pusat pemerintahan dan ibukota sehingga dapat kemudahan untuk pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sedangkan untuk Kabupaten Kotabaru dan Banjar, berada di kuadran 3 (Investasi Swasta tinggi, IPM rendah) karena kebanyakan motif investor adalah untuk mencari keuntungan dan tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat, sehingga tingginya investasi di daerah ini kurang berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Temuan teoritis dalam penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan teori Anggaran penerimaan dan belanja negara berpengaruh terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja Rossen (2002), pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran seperti yang dikemukakan Hayek (1945) dalam Khusaini (2006) tentang *knowledge society*, sehingga dalam hal pengkombinasian modal yang berasal dari pemerintah dapat dilakukan dengan lebih

efisien, karena daerah dianggap yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan termasuk dalam hal menyediakan kesempatan kerja.

Meskipun tidak signifikan variabel investasi swasta menggambarkan arah hubungan positif sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mankiw (2007) dimana investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif, Menurut Solow dalam Arsyad (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output, pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan sedangkan teknologi dianggap konstan (tidak berubah).

Studi empiris yang sejalan dengan hasil temuan dalam penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Hammond dan Tosun (2009), Studi empiris yang sejalan tentang investasi swasta adalah Hendarmin (2012) pengaruh investasi swasta di 12 Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dan Faroek (2010) semakin berkembang industri berarti investasi swasta semakin besar namun di Provinsi Kalimantan Timur justru berdampak mengurangi pertumbuhan ekonomi karena industri nya termasuk dalam jenis investasi yang menghasilkan sektor primer yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang rendah, sehingga dampak terhadap tenaga kerja terserap tidak besar, karena sebagian besar usaha perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan sebagai tujuan investasi swasta sebagian besar masih belum memiliki industri pengolahan, selain itu juga persaingan juga datang dari banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar daerah.

### 5.2.2. Hasil Regresi Tahap Kedua

Regresi tahap kedua, adalah mendapatkan nilai estimasi untuk pertumbuhan ekonomi dan juga tenaga kerja terserap sebagai variabel antara dari variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta dengan hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 5.11 dengan metode PLS, FEM dan REM. Hasil estimasi dari ke 3 metode tadi dilanjutkan dengan pemilihan model terbaik menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, Hasil Uji Chow sebagai berikut:

Tabel 5.10  
Hasil Estimasi Variabel GRO dan TKT terhadap Kesejahteraan Masyarakat  
Metode PLS, FEM, REM

Variabel	PLS	FEM	REM
C	67,45 (7,79)	73,66 (8,39)	65,79 (7,78)
GRO(-4)	-3,36 (0,78)	-3,47 (1,59)	-3,38* (0,78)
TKT(-4)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
R <sup>2</sup>	0,87	0,27	0,31
Prob F (Stat)	0,00*	0,00*	0,00*

Keterangan: \*Signifikan pada  $\alpha = 1\%$   
( ) standard error

Hasil Uji Chow diketahui diperoleh nilai F sebesar 32,29 dengan Prob. sebesar 0,00 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol

yang menyatakan model PLS lebih baik daripada FEM ditolak, berarti hipotesis alternatif yang diterima yaitu model FEM lebih baik daripada model PLS. Uji Hausman memberikan hasil *Chi-Square* sebesar 3,78 dengan Prob sebesar 0,96, maka hipotesis nol model REM lebih baik daripada FEM diterima, hasilnya memilih model terbaik dengan metode REM, untuk selanjutnya hasil estimasi yang digunakan metode REM.

Tabel 5.11 Hasil Uji Chow dan Hausman

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32,29	(12,81)	0.00
Cross-section Chi-square	3,78	12	0.96

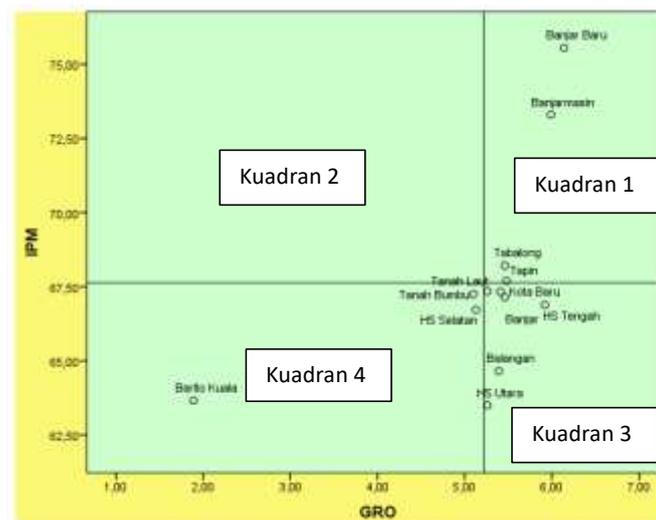
Berdasarkan pemilihan metode terbaik adalah REM, maka tidak perlu melakukan pengujian permasalahan asumsi Klasik karena sudah menggunakan metode GLS, dari metode REM lihat Tabel 5.10 diketahui bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama dapat diterima dengan F sebesar  $0,00 < \alpha = 0,05$ , secara partial hipotesis hanya pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diterima dengan t sebesar  $0,00 < \alpha = 0,05$  dengan arah hubungan yang negatif yang berarti bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dibentuk dari derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta dimana diketahui bahwa pengaruh variabel derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan namun dengan arah yang negatif dan variabel investasi swasta pengaruh secara tidak signifikan dengan arah yang positif.

Kondisi ini tidak terlepas dari pembentuk variabel desentralisasi fiskal yang banyak di sumbang oleh dana bagi hasil bukan pajak (SDA) bukan bersumber dari kemandirian yang kuat dari daerah yakni PAD, ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang bersumber dari sektor primer sangat riskan terutama ketika terjadi fluktuasi harga komoditas di pasar global sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat terpukul, seperti yang dikemukakan Frankel dalam Muttaqin (2018) tentang kutukan sumber daya alam (*natural resources curse*), negara-negara berkembang yang kaya SDA tidak dapat mencapai perekonomian yang maju dan standar hidup yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh: jatuhnya harga komoditi dalam jangka panjang, institusi yang lemah, korupsi, dan kegagalan mengelola keuntungan SDA untuk diinvestasikan pada SDM dan peningkatan kapasitas lembaga

Hipotesis tenaga kerja terserap berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat diterima karena sampai dengan lag ke 4 tidak ada nilai  $t < \alpha = 0,05$ , terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa ketergantungan daerah terhadap komoditas primer adalah sangat riskan ditambah dengan pengalokasian APBD yang tidak efisien serta kegagalan reinvestasi dalam mengelola keuntungan SDA untuk diinvestasikan pada SDM dan peningkatan kapasitas lembaga sehingga dampaknya terhadap tenaga kerja terserap tidak signifikan, yang akhirnya berdampak tidak signifikan pula pada kesejahteraan masyarakat.

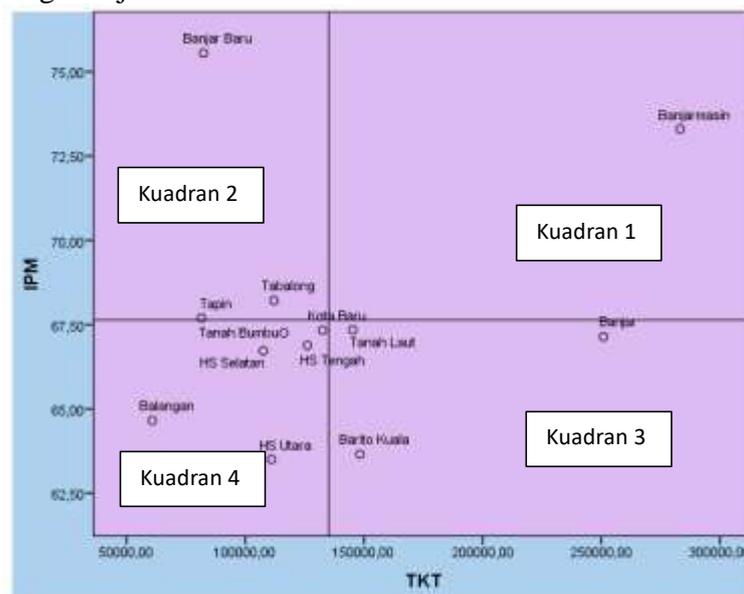
Menurut Dunn Jr. dan Mutti dalam Muttaqin (2018) dampak jatuhnya harga komoditi andalan ekspor memukul pendapatan negara berkembang, menurunkan kapasitas fiskal, dan menyebabkan turunnya standar hidup penduduk, jadi adalah wajar jika temuan dalam penelitian ini investasi swasta tidak signifikan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat negatif karena ketergantungan terhadap dana bagi hasil SDA sebagai kapasitas fiskal daerah adalah sangat rentan terhadap kondisi global dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan, hal ini juga ditambah oleh lemahnya kelembagaan di daerah dalam hal alokasi pengeluaran daerah yang diketahui bahwa sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja modal yang berdampak pada buruknya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan belum mampu mengangkat daya beli masyarakat yang membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan akses terhadap berbagai macam barang dan jasa yang bisa memberikan kesejahteraan, berupa pendidikan dan kesehatan, sehingga semua komponen IPM tidak dapat di penuhi masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya.

Temuan teoritis dan empiris dalam penelitian ini didukung oleh 2 hasil pemetaan yakni tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja terserap dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, kedua hasil pemetaan ini dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan 5.5, berdasarkan pemetaan pada Gambar 5.4 diketahui sebagian besar daerah kabupaten/kota berada pada kuadran 3 kuadran ini bercirikan memiliki angka pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata namun memiliki angka IPM dibawah rata-rata, hal ini menggambarkan bahwa tidak semua daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi otomatis tingkat kesejahteraan juga tinggi, karena daerah ini kaya akan sumber daya alam, namun tidak dinikmati/dirasakan oleh masyarakat sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum tidak menjadi lebih baik. Daerah di kuadran 3 Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Balangan, daerah ini kaya akan sumber daya alam, namun tidak dinikmati/dirasakan oleh masyarakat sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum tidak menjadi lebih baik. Daerah yang berada pada kuadran 4 adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala dan Tanah Bumbu, daerah dengan angka pertumbuhan ekonomi dan angka IPM yang rendah.



**Gambar 5.5**  
**Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**  
**Tahun 2005-2016**

Hubungan antara tenaga kerja terserap dan kesejahteraan masyarakat tergambar pada Gambar 5.5 sebagian besar daerah kabupaten/kota berada pada kuadran 4 (Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai selatan dan Hulu Sungai Utara), kuadran 3 (Kabupaten Tanah Laut, Banjar, dan Barito Kuala), kuadran 2 (Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong), kuadran 1 (kota Banjarmasin). Daerah pada kuadran 3 memiliki tenaga kerja terserap diatas rata-rata tetapi memiliki tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata, kondisi ini sangat ironis mengingat tenaga kerja terserapnya banyak tetapi kesejahteraannya masih dibawah rata-rata kabupaten/kota lain, daerah yang berada di kuadran 2 adalah daerah yang memiliki ciri sebaliknya yaitu daerah dengan Tenaga kerja terserap lebih rendah dari rata-rata tetapi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat diatas rata-rata, hal ini disebabkan karena fasilitas infrastruktur dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang tepat, meskipun kemampuan investasi swasta dalam menyerap tenaga kerja relatif lebih kecil dari daerah lain.



**Gambar 5.6**  
**Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**berdasarkan Tenaga Kerja Terserap dan Kesejahteraan Masyarakat**  
**Tahun 2005-2016**

Daerah yang berada pada kuadran 1 Kota Banjarmasin daerah dengan Tenaga kerja Terserap dan IPM juga tinggi, daerah pada kuadran 2 adalah Kabupaten Tabalong, Tapin dan Banjarbaru daerah pada kuadran ini memiliki tingkat kesejahteraan diatas rata-rata tetapi memiliki tenaga kerja terserap dibawah rata-rata, hal ini disebabkan karena fasilitas infrastruktur dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui alokasi anggaran yang tepat, namun kemampuan investasi swasta dalam menyerap tenaga kerja relatif lebih kecil dari daerah lain, daerah yang berada di kuadran 3 adalah Barito Kuala, Tanah Laut dan Banjar, daerah pada kuadran ini memiliki ciri yang sebaliknya yaitu daerah dengan Tenaga kerja terserap tinggi tetapi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, kondisi ini sangat ironis mengingat tenaga kerja terserapnya banyak tetapi kesejahteraannya masih dibawah rata-rata kabupaten/kota lain, ini menggambarkan bahwa produktivitas tenaga kerja rendah karena sebagian besar tenaga kerja bekerja disektor pertanian, sama dengan daerah yang berada pada kuadran 4 adalah Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Balangan dan Kotabaru juga didominasi oleh pekerja disektor pertanian.

Hasil analisis kuadran terhadap keseluruhan temuan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 5.12  
Kesimpulan Hasil Analisis Kuadran

Variabel yang dianalisis	Kuadran 1 (Terbaik)	Kuadran 4 (Terburuk)	Pemenang	Kalah
DDF dan IPM	Tabalong	Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan	Kota Banjarmasin	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
IP dan IPM	Banjarmasin, Banjarbaru	Balangan, Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan		
GRO dan IPM	Banjarmasin, Banjarbaru	Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Selatan		
TKT dan IPM	Banjarmasin	Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan		

Dari kesimpulan hasil pemetaan ini maka pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat hendaknya memperhatikan kondisi tersebut dan daerah yang kalah harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, sedangkan daerah yang keluar sebagai pemenang dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain untuk membuat kebijakan agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik, meskipun demikian daerah yang keluar sebagai pemenang harus tetap

konsisten untuk terus berkembang dan melaksanakan semua kegiatan yang selama ini bermanfaat bagi masyarakat.

### **5.3. Kontribusi Hasil Penelitian**

Temuan dalam studi ini, berupa temuan teoritis dan empiris diharapkan mampu untuk pengembangan studi teoritis dan empiris yang selanjutnya diharapkan berkontribusi dalam pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### **5.3.1. Temuan Teoritis**

Temuan dalam penelitian ini yang terkait dengan kerangka pemikiran teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Teori tentang pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Keynes dalam Sukirno (2012), teori pengeluaran pemerintah Wagner, Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesobroto (2013) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penelitian ini sejalan dengan teori tersebut diatas, namun dengan arah hubungan yang negatif, hasil studi menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal dengan pendekatan pengeluaran, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan arah yang negatif, artinya ketika variabel derajat desentralisasi fiskal meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, dan berdasarkan hasil menganalisis data keuangan diketahui bahwa komponen pembentuk dari derajat desentralisasi fiskal sebagian besar bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam dari sisi sumber penerimaan daerah, dan disisi lain alokasi dari sumber penerimaan daerah juga perlu diperhatikan mengingat komponen belanja daerah sebagian besar adalah untuk belanja pegawai.
2. Teori tentang pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2013), Keynes dalam Sukirno (2012), Mankiw (2007) Harrod Domar dalam Arsyad (2010), Kaldor dalam Djojohadikusumo (1994) menyatakan bahwa Investasi Swasta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, temuan dalam penelitian ini menolak teori tersebut diatas, variabel investasi swasta di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif, hal ini relevan mengingat kebanyakan investor di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang di dominasi oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan besar luar daerah, yang outputnya belum diolah, belum ada industri yang relevan, sehingga dampak investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.
3. Teori tentang pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja terserap, Rossen (2002), dan Hayek dalam Khusaini (2006) menyatakan bahwa anggaran dan pendapatan negara yang dialokasikan ke daerah akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja karena daerah yang lebih tahu yang mereka butuhkan, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan signifikan mempengaruhi jumlah tenaga kerja terserap dengan arah hubungan positif, hal ini dikarenakan besarnya alokasi belanja daerah yang disalurkan sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian mampu menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga menciptakan lapangan

pekerjaan yang mampu menambah jumlah tenaga kerja terserap, disisi lain daerah jangan terlenu karena perlu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan rencana pengembangan industri pengolahan melalui sekolah Vokasi dan Balai latihan Kerja.

4. Teori tentang pengaruh investasi swasta terhadap jumlah tenaga kerja terserap. Solow dalam Arsyad (2010), Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2013), dan Mankiw (2003) hasil dalam penelitian tidak sejalan dengan teori tersebut karena variabel investasi swasta di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2005-2016 berpengaruh secara tidak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja terserap dengan arah positif, hal ini terjadi karena sebagian besar investasi swasta di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan bergerak di sektor Pertambangan dan Perkebunan yang belum ada industri pengolahannya, selain itu sebagian tenaga kerja juga berasal dari daerah lain, seperti yang tergambar pada banyaknya tenaga kerja terserap di daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru, dan Batola kebanyakan berasal dari pulau Jawa dan Sulawesi.
5. Teori tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. oleh Keynes dalam Sukirno (2012), Wagner, Peacock dan Wiseman, Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2013), Mankiw (2003), Harrod Domar dalam Arsyad (2010), Kaldor dalam Djojohadikusumo (1994), hasil dalam penelitian tidak sejalan dengan teori tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah hubungan negatif Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2005-2016, hasil temuan ini relevan dengan keadaan di daerah karena tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diketahui melalui pertumbuhan ekonomi dengan variabel derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta, derajat desentralisasi fiskal sangat besar bergantung pada dana bagi hasil SDA yang bersumber dari produk primer yang sangat sensitif terhadap perubahan global sehingga tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, disisi lain investasi swasta di Provinsi Kalimantan Selatan belum memberikan kontribusi yang besar,
6. Teori tentang pangaruh tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat. Rossen (2002), dan Hayek dalam Khusaini (2006), Solow dalam Arsyad (2010), Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2013), dan Mankiw (2003), hasil penelitian ini tidak sejalan teori tersebut, diketahui bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2005-2016 dengan arah positif, hasil temuan ini relevan karena kurang terserapnya tenaga kerja dalam pasar kerja akan berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

### **5.3.2. Temuan Empiris**

Temuan dalam penelitian ini yang terkait dengan studi empiris yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut :

1. Pengaruh partial Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di

Provinsi Kalimantan Selatan periode 2005-2016, penyebabnya adalah karena pendelegasian wewenang kepada daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur alokasi anggaran sehingga ketika daerah mampu mengalokasikan anggarannya secara efisien akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun jika tidak maka justru terjadi sebaliknya maka derajat desentralisasi fiskal justru mendistorsi pertumbuhan hal ini dikarenakan besarnya belanja pegawai mendominasi alokasi anggaran, Sejalan dengan hasil penelitian Studi empiris tentang pengaruh variabel desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Davoodi dan Zou (1998), Fauziah (2007), Rodriguez-Pose and Kroijer (2009), Baskaran & Felds (2009), Rodriguez-Pose and Ezcurra (2010), Jumadi (2013).

2. Pengaruh partial investasi swasta berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, sejalan dengan hasil studi empiris Hendarmin (2012) di Provinsi Kalimantan Barat dan Faroek (2010) di Provinsi Kalimantan Timur, karena kebanyakan investor di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar luar daerah dalam sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sehingga pendapatan daerah hanya mendapatkan imbalan berupa royalty saja untuk usaha tambang, dan untuk usaha perkebunan sawit yang dihasilkan belum diolah sehingga investasi swasta tidak memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang.
3. Pengaruh partial Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Tenaga Kerja Terserap signifikan dengan arah positif karena melalui Derajat Desentralisasi Fiskal menyebabkan perubahan dalam stok modal dalam perekonomian, yang selanjutnya perubahan stok modal akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja, karena modal merupakan input komplementer yang dibutuhkan untuk menghasilkan output, walaupun dalam batas-batas tertentu juga bersifat substitusi atau saling menggantikan. Penelitian yang sejalan dengan temuan empiris ini seperti yang dilakukan oleh Hammond dan Tosun (2009), sejalan dengan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap tenaga kerja terserap.
4. Pengaruh investasi swasta secara partial tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap namun dengan arah positif, karena umumnya investasi swasta di sebagian besar Kabupaten/Kota investasi swasta kepada sektor pertambangan dan perkebunan namun belum ada industri pengolahannya, hasil ini sejalan dengan studi empiris yang dilakukan oleh Hendarmin (2012), bahwa investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap.
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi signifikan dengan arah negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena variabel derajat desentralisasi fiskal sebagian besar bersumber dari dana bagi hasil SDA sejalan dengan temuan Frankel dalam Muttaqin (2018) tentang kutukan sumber daya alam (*natural resources curse*), negara-negara berkembang yang kaya SDA tidak dapat mencapai perekonomian yang maju dan standar hidup yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh: jatuhnya harga komoditi dalam jangka panjang, institusi yang lemah, korupsi, dan kegagalan mengelola keuntungan SDA untuk

diinvestasikan pada SDM dan peningkatan kapasitas lembaga, sehingga pengaruhnya negatif terhadap kesejahteraan masyarakat,

6. Pengaruh tenaga kerja terserap secara partial adalah tidak signifikan dengan arah positif terhadap Kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh daya beli yang dimiliki masyarakat itu bersumber dari kemudahan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, ketika semakin sedikit tenaga kerja terserap di pasar kerja tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang akan semakin terbatas untuk di konversi dengan layanan komponen pembentuk IPM sebagai ukuran kesejahteraan, sejalan dengan hasil temuan penelitian Dunn Jr. dan Mutti dalam Muttaqin (2018) dampak jatuhnya harga komoditi andalan ekspor memukul pendapatan negara berkembang, menurunkan kapasitas fiskal, dan menyebabkan turunnya standar hidup penduduk.

#### **5.4. Implikasi Hasil Penelitian bagi Kebijakan Daerah**

Berdasarkan temuan empiris dan teoritis dapat dirumuskan implikasi hasil penelitian bagi kebijakan daerah sebagai berikut :

1. Mendorong semua daerah Kabupaten/Kota memanfaatkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang memuat secara online tentang e-database, e-planning, e-money, dan e-reporting, agar semua alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terpantau dan mengurangi pemborosan, sehingga peranan pemerintah melalui desentralisasi fiskal berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
2. Membuat regulasi yang mengatur investasi swasta harus di reinvestasi dalam persentase tertentu setiap tahun untuk yang digunakan untuk membangun industri pengolahan bagi produk primer yang selama ini tidak memberikan nilai tambah bagi daerah.
3. Daerah mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan rencana pengembangan industri pengolahan melalui sekolah Vokasi dan Balai Latihan Kerja.
4. Daerah mensyaratkan bagi investasi swasta melalui aturan tentang persentase jumlah tenaga kerja lokal sebagai salah satu persyaratan investasi swasta.
5. Daerah mengatur besaran persentase investasi yang harus di reinvestasi terutama investasi swasta yang menggerakkan SDA untuk peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
6. Daerah menyiapkan infrastruktur berupa industri pengolahan dan iklim investasi yang menarik bagi swasta untuk berinvestasi sehingga tercipta kesempatan kerja yang akan semakin banyak menyerap tenaga kerja sambil melalui sekolah vokasi dan BLK menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan rencana industri pengolahan yang akan didirikan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **5.5. Keterbatasan**

Tahapan demi tahapan dalam penelitian dilakukan oleh peneliti, disadari bahwa dalam penelitian ini ditemukan beberapa keterbatasan berupa :

1. Ketersediaan data yang sekunder yang tidak memadai, karena adanya pemekaran 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru yang membentuk 2 Kabupaten baru yakni Kabupaten Balangan dan Kabupaten

Tanah Bumbu berakibat pada data beberapa variabel penelitian yang ada series yang kurang, yang berkemungkinan berdampak pada hasil output dalam penelitian ini.

2. Penggunaan variabel Kesejahteraan Masyarakat dalam penelitian ini di proxy dengan IPM, yang merupakan indek komposit dari 3 indikator yakni daya beli, kesehatan dan pendidikan maka pengaruh terhadap indikator secara satu persatu tidak terukur.

## BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian analisis dampak Derajat Desentralisasi Fiskal, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

- a. Hipotesis pertama yang menyatakan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat diterima, namun secara partial hanya Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat diterima dengan arah hubungan negatif, sedangkan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diterima, namun dengan arah hubungan yang positif.
- b. Hipotesis kedua yang menyatakan derajat desentralisasi fiskal dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap Tenaga Kerja Terserap dapat diterima. Sedangkan secara partial hanya derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Tenaga Kerja Terserap dapat diterima, sedangkan investasi swasta tidak dapat diterima.
- c. Hipotesis ketiga menyatakan pertumbuhan Ekonomi (*predicted*) dan Tenaga Kerja Terserap (*predicted*) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat dapat diterima dan secara partial hipotesis yang menyatakan pertumbuhan Ekonomi (*predicted*) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat diterima dengan arah hubungan yang negatif, sedangkan hipotesis Tenaga Kerja Terserap (*predicted*) berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat tidak dapat diterima.

### 6.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Daerah untuk bisa mengalokasikan anggaran secara benar dan keberpihakan kepada masyarakat, derajat desentralisasi fiskal yang tinggi dan menggambarkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah secara total adalah baik, namun komposisi pembentuknya juga penting, mengingat komponen dalam perhitungan derajat desentralisasi fiskal menyangkut kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Lain-lain pendapatan yang sah, maka sangat penting bagi daerah untuk berupaya lebih keras untuk bisa meningkatkan kemandirian daerah yang bersumber dari PAD melalui sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat akan dengan suka rela untuk melakukan pembayaran pajak, melaporkan semua kegiatan yang bisa menjadi sumber penerimaan daerah secara teratur dan tertib. Selain itu komitmen pemerintah untuk mengalokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Investasi swasta dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja terserap, maka perlu adanya aturan yang melindungi daerah menyangkut pengelolaan hasil investasi yang ditanamkan di daerah, dan aturan tentang keharusan bagi investor untuk melakukan reinvestasi dengan persentase tertentu ke daerah agar mampu jadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan terus menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu juga pemerintah daerah memiliki aturan untuk agar investasi swasta bisa menciptakan dampak yang luas baik ke depan maupun ke belakang dengan mendirikan industri pengolahan, bukan hanya industri primer yang setelah dipanen langsung dijual tanpa diolah sehingga nilai tambahnya tidak dapat dinikmati masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Andrea, F., dan Agnese, S. (2013). Varieties of decentralization, institutional complementarities, and economic growth: evidence in OECD countries. 54<sup>o</sup> *Conferenza SIE, 24-26 ottobre 2013*. Bologna: Università Bologna.
- Adib, M. (2010). *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariefianto, D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Litbang Depdagri RI, dan FISIPOL UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam rangka Otonomi Daerah Nyata dan Bertanggung jawab*. Jakarta.
- Badrudin, R., dan Baldric, S. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia Economic. *Journal of Emerging Markets*.
- Bailey, J. (1995). *Publik Sector Economics : Theory, Policy and Praticce*. Houndmills Hampshire : Max Millan Press LTD.
- Baskaran, T., dan Felds, L. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries; Is There a Relationship? *CESifo Working Paper No.2721*.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bank Indonesia. (2017). *Investasi di Kabupaten/Kota*. Bank Indonesia Jakarta
- Bird, R. M. (1993). Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*. vol. 46 issue 2, 207-227.
- Bird, R., dan Vaillancourt, F. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Blochliker, H. (2013). Decentralisation and Economic Growth - Part 1 : How Fiscal Federalism Affect Long-Term Development. *OECD Working Paper on Fiscal Federalism No 14*.
- Boex, dan Jamie, B. (2001). *An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relation*. Atlanta: International Studies Program, Andre Young School of Policy Studies Georgia State University.
- Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparties Evidence from the Colombian Experience. *The Annals of Regional Science* .Issue 3 661-676.
- BPS. (2006) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2005*. Jakarta. BPS.
- BPS. (2007) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2006*. Jakarta. BPS
- BPS. (2008a) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2007*. Jakarta. BPS
- BPS. (2008b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha 2005-2007*. BPS Kalimantan Selatan
- BPS. (2009) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2008*. Jakarta. BPS
- BPS. (2010a) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2009*. Jakarta. BPS

- BPS. (2010b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha 2007-2009*. BPS Kalimantan Selatan
- BPS. (2011a) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2010*. Jakarta. BPS
- BPS. (2011b). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan*. BPS. Kalimantan Selatan.
- BPS. (2012a) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2011*. Jakarta. BPS
- BPS. (2012b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha 2009-2011*. BPS Kalimantan Selatan
- BPS. (2013) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2012*. Jakarta. BPS
- BPS. (2014) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2013*. Jakarta. BPS
- BPS. (2015) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2014*. Jakarta. BPS
- BPS. (2016a) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2015*. Jakarta. BPS
- BPS. (2016b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Kalimantan Selatan. BPS
- BPS. (2017a) *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2016*. Jakarta. BPS
- BPS. (2017b). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. BPS. Jakarta.
- BPS. (2017c). *Direktori Perusahaan Industri Manufaktur Menengah dan Besar Kalimantan Selatan*. Banjarbaru: BPS Kalimantan Selatan.
- BPS. (2017d). *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru:
- BPS. (2018a). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. BPS. Kalimantan Selatan
- BPS. (2018b). *Tabel Dinamis IPM 2005-2016*. Retrieved 15 Juli, 2018 diunduh dari <https://kalsel.bps.go.id/site/resultTab>
- BPS. (2018c). *Statistik Dasar Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa) menurut Kabupaten/Kota tahun 2007-2017*. Retrieved 12 Maret, 2018 diunduh dari <https://kalsel.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja>
- BPS. (2018d). *Statistik Daerah provinsi Kalimantan Selatan*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- BPS. (2019). *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan . Banjarbaru
- Brothaler J., dan Getzner M. (2010). Effects of fiscal decentralisation on public sector growth in Austria. *Public Finance and Management*.
- Davoodi, Hamid dan Zou, Heng-Fu. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth : a Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*. Vol 43, Issue 2, 244-257
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Faroek, A. I. (2010). *Pengaruh Nilai Tambah Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Pertumbuhan*

- Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Fauziah, S. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Economic and Finance in Indonesia*, 109-134.
- Gemmell, N., Kneller, R., dan Sanz, I. (2013). Fiscal Decentralization and Economic Growth :Spending VS Revenue Decentralization. *Econ Papers*.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies Inc.
- Gujarati, Damodar N, dan Dawn C, P. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1 dan 2 Edisi 5*. Salemba Empat. Jakarta
- Hadi, S. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 50-69.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. YKPN. Yogyakarta
- Hammond, dan Tosun. (2009). The Impact of Local Decentralization on Economic Growth Evidence From U.S. Countries. *Journal of Regional Science*.
- Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 144-155.
- Ihallow, J. (2008). *Konstruksi teori : Komponen dan Proses*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Indonesia Investment. (2019). *Batubara Indonesia- Analisis sektor Pertambangan* Retrieved 14 Juli, 2019 diunduh dari <https://www.indonesia-investment.com>
- Irena, S. (2014). Fiskal Decentralism and Economic Development in Selected Unitary European Countries. *European Financial and Accounting Journal*, 22-40.
- Jumadi. (2013). *Dampak Implementasi terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal di Jawa Timur*. Malang: Universitas Brawijaya. Malang
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE UNIBRAW. Malang.
- Kuncoro, H. (2002). Upah Sisme Bagi hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 45-54.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, ISSN : 2301 - 8968.
- Ma, J. (1997). *Intergovernmental Fiscal Transfer : a Comparison of Nine Countries (case of the United State, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India and Indonesia)*. The World Bank.
- Mangkoesoebroto, G. (2013). *Ekonomi Publik*. BPFE cetakan ke 16. Yogyakarta.
- Mankiw, N. (2007). *Macroeconomics (6<sup>th</sup> ed)*. World Publisher, 41 Madison Avenue. New York.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Martinez, V., Jorge, dan Boex, J. (2001a). *The Design of Equalization Grants Theory and Application. Part one : Theori and Concepts Fiscal Policy*. Atlanta Gregoria: Training Program Fiscal Decentralization Course World

- Bank Institute and Gregoria State University Andrew Young School of Policy Studies.
- Martinez, V., Jorge, dan Boex, J. (2001b). *The Design of Equalization Grants Theory and Application. Part two : Simulating the Allocation of Transfer Piscal Policy Training Program*. Atlanta Georgia: World Bank Institute and Georgia State University Andrew ang Young of Policy Studies
- Martinez, V., Jorge, M, dan McNab,R. (2001). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *International Studies Program, Working Paper-01*.
- Miemyk, W. (1980). *Economics*. Random House. New York.
- Morris D, M. (1979). *Measuring The Condition of The World Poor, The Physical Quality of Life Index*. Pergamon Press. New York.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .
- Muttaqin. (2018). *The Dilemma of Export and Primary Sector on Regional Income Equality and Proverty in Indonesia*. Disertasi University of Birmingham
- Nachrowi, D., dan Usman , H. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Nasikun. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana . Yogyakarta.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization And Economic Development. *National Tax Journal Vol.XLVI, 237–243*.
- Phillips, K., dan Woller, G. (1997). "Does Fiskal Decentralization Lead to Economics Growth?". *Working Paper No 97, September ,Vol.13 Issue I*.
- Pigou, A. (1960). *The economic of Welfare*. Mac Milan & Co.Ltd Fourth Edition. London.
- Pepinsky, Thomas B dan Wihardja, Maria M. (2018) Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asia Studies. Vol. 11, issue 3, 337-371*
- Prudhomme, R. (1995). On The Danger of Decentralization. *The World Bank ,Policy Working Paper 1252, Washington DC*.
- Rita, Soetriono, dan Hanafie. (2007). *Filsapat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Andi. Yogyakarta:
- Rodriquez-Pose, A., dan Bwire, Adala. (2004) *The economic in Efficiency of Devolution. Sage Journals*
- Rodriguez - Pose, A., dan Kroijer, A. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *LEQS Paper No 12*.
- Rodriguez-Pose, A., dan Ezcurra, R. (2010). Is Fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidance from OECD countries. *Juornal of Economic Geography, 619-643*.
- Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. *Journal of Political Vol.94*.
- Rondinelli, D. (2001). *Concept of FisclDecentralization and Worldwide* . World Bank Insitute: Intergovernmental Fiscal Relation and Local Financial Management.
- Rosidi, S. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rodden, Jonathan. (2002). Streng ini Numbers? : Representation and Redistribution in the European Union. *Sage Journal*

- Rossen, S. (2002). *Public Finance*. McGraw-Hill International Edition. New York.
- Samuelson, P., dan Nordhaus, W. (2013). *Economics*. (9<sup>th</sup> ed). McGraw-Hill Book Co. Singapore.
- Sarwoko. (2005). *Dasar-dasar Ekonometrika*. PT.Andi. Yogyakarta.
- Sekaran, U., dan Bogie, R. (2013). *Research Method for Bisnis*.: Jhon Wiley & Sons Ltd. United Kingdom.
- Simanjuntak, R. (1998). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Sumbangan Pemikiran FE-UI pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi*. LPEM-UI. Jakarta.
- Slinko, I. (2002). Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Mupicipalities and Growth Russian Regions. *Avaliable: <http://www.econpapers.repec.org>*.
- Soeherman, A. D., Mursinto, D., dan Ratnawati, T. (2014). The Influential of Private Investment, Public Investment on Economic Growth and Labor Absorption and Public Welfare of District/City in East Java Province. *GSTF Journal on Business Review (GBR)*, Vol.3 No.4.
- Sow , M., dan Razafimahefa, I. (2015). Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery. *IMF Working Paper*.
- Sukanto, R. (2001). *Ekonomika Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sunoto. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2001-2008. *ETD Gadjah Mada University*.
- Suparmoko, I. (2010). *Ekonomika Pembangunan. Edisi keenam*. BPFE. Yogyakarta.
- Tasrin, K., dan Wulandari, P. (2012). Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Kabupaten;Kota di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No.2*.
- Theßen. (2003). Fiscal decentralization and Economic Growth in High income OECD Countries. *Fiscal Studies*. Vol.24. Issue 3. 237-274.
- Todaro, M., dan Smith, S. (2013). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Whitaker, William H, dan Frederico, R. (1997). *Sosial Welfare in Today's World*. The Mc Grow-Hill Companies. New York.
- Wibisono, Y. (2005). *Metode Statistik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonesia FE UII.
- Zadjuli, S. I. (1986). *Pola Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur* . Program Pascasarjana Airlangga. Surabaya.
- Zakaria, S. (2012). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Kawasan Timur Indonesia*. Disertasi Program Doktor Universitas Brawijaya. Malang.
- Zhang, T., dan Zou, H.-f. (2001). *The Growth Impact of Intersectoral an Intergovernmental Allocation of Public with Application in China and India*.
- Zulyanto. (2010). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. School of Postgraduate. Universitas Diponegoro Semarang .



